

**ANALISIS DISPARITAS PERBANDINGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI ANTAR KELURAHAN DI KOTA TERNATE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Eka Sari Nurcahyani

NIM. 1941050

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Sari Nurcahyani

NIM : 1941050

Program : Sarjana (Strata Satu)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 11 September 2023

Saya yang menyatakan,



Eka Sari Nurcahyani

NIM. 1941050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Di
Manado,-
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Eka Sari Nurcahyani
Nim : 1941050
Judul Skripsi : Analisis Disparitas Perbandingan Pembangunan Ekonomi
antar Kelurahan di Kota Ternate

Sudah dapat diajukan ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Manado, 31 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Pembimbing II



Chadija Haris, M.M
NIP. 198703112019032007

Mengetahui;
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A
NIP. 199403152019032018

PENGESAHAN SKRIPSI

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Analisis Disparitas Perbandingan Pembangunan Ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate**" yang disusun oleh Eka Sari Nurcahyani, NIM: 1941050, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang di selenggarakan pada tanggal 11 September 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Shaffar 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa Perbaikan.

Manado, 23 Oktober 2023

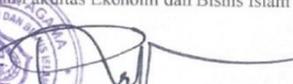
J rabul-akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. <u>Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum</u>	()
Sekretaris	: <u>Chadjiah Haris, M.M</u>	()
Munaqisy I	: <u>Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA, CGRM</u>	()
Munaqisy II	: <u>Lilly Anggrayni, M.S.A</u>	()
Pembimbing I	: Prof. <u>Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum</u>	()
Pembimbing II	: <u>Chadjiah Haris, M.M</u>	()

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Radiyah Hajar Jan, M.Si.
 NIP. 197009061998032001



MOTTO

كُتِبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya: “(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad), maka janganlah engkau sesak dada karenanya supaya dengan (kitab itu) engkau memberi peringatan, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-A‘rāf [7]:2)

“Kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah sebaiknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

-anonim-

ABSTRACT

ABSTRACT

Name : Eka Sari Nurcahyani
Students' ID : 1941050
Faculty : Islamic Economics and Business
Study Program : Sharia Economics
Title : Comparative Disparity Analysis of Economic Development Among Subdistricts in Ternate City

This research aims to identify how development inequality occurs between Ternate City Subdistricts from 2019-2022. Considering the exploitation and response management and strengthening local capacity to support Ternate City's physical and digital infrastructure development processes and services. This research employs a qualitative research method based on post positivism or input philosophy which is used to investigate the state of natural objects. The inequality in economic development among the sub-districts of Ternate City is known for the various problems faced or experienced by the community, especially in the three sub-districts/sub-districts of Batang Dua, Moti and Hiri. The review of economic development among the cities of Ternate has several indicators outlined in Islamic Economics and requires uniform economic development. First; The government must ensure that people have an easy access to services and infrastructure. Second; If development investment does not lead to the development of each region, the benefits will only be enjoyed by ordinary people. Third; Unequal development will give rise to social inequality. The busy centers of Ternate city, such as the South, North and West Ternate sub-districts, will find it very easy to find urban views. Such as shopping centers, tourism and others. Other islands in Ternate City are untouched because the economic center is still focused on densely populated areas. This has become a concern for the Ternate City government in carrying out Development Stabilization to prevent obstacles to development in Ternate City.

Keywords: *disparity, regional economic development, sharia economic development*

ABSTRAK

Nama : Eka Sari Nurcahyani
NIM : 1941050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Disparitas Perbandingan Pembangunan
Ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana ketimpangan pembangunan yang terjadi di antara Kelurahan Kota Ternate antar tahun 2019-2022. Mempertimbangkan eksploitasi dan manajemen respons dan memperkuat kapasitas lokal untuk mendukung proses dan layanan pembangunan infrastruktur fisik dan digital Kota Ternate. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada postpositivisme atau filsafat masukan yang digunakan untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan Kota Ternate dikenal dengan berbagai permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh masyarakat khususnya di tiga kecamatan/kelurahan Batang Dua, Moti dan Hiri. Tinjauan pembangunan ekonomi antara kota Ternate memiliki beberapa indikator yang dituangkan dalam Ekonomi Islam dan membutuhkan keseragaman pembangunan ekonomi. Pertama; Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah ke layanan dan infrastruktur. Kedua; Jika investasi pembangunan tidak mengarah pada pembangunan masing-masing daerah, keuntungannya hanya dinikmati oleh rakyat biasa. ketiga; Pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan kesenjangan sosial. Pusat keramaian kota Ternate seperti kecamatan Ternate Selatan, Utara, Barat akan sangat mudah menemukan gambaran perkotaan. Seperti pusat perbelanjaan, pariwisata dan lainnya. Di pulau lain dalam Kota Ternate tidak terjamah karena pusat perekonomian masih terfokus pada daerah yang padat penduduk. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Ternate dalam melakukan *Development Stabilization* untuk mencegah hambatan pembangunan di Kota Ternate.

Kata Kunci: *Disparitas, Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga kita semua senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad S.a.w, Keluarganya, Sahabatnya, dan Insya Allah selalu mendapatkan curahan rahmatnya pada kita selaku umat pengikutnya. Sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan judul “Analisis Disparitas Perbandingan Pembangunan Ekonomi antar Kelurahan Kota Ternate” dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan tepat waktunya.

Dalam penelitian ini jika tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik yang sangat berarti untuk tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna dan baik. Maka dari itu, ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak Bahtiar Sumaila dan Ibu Harwiwi Sangaji, yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tara sehingga menjadi pendengar keluh kesah serta menjadi motivasi hingga mampu bertahan sampai pada tahap ini, serta adik tersayang Dwi Bayu Adinditya dan Destriyawan Prasetya yang telah menjadi penghibur dikala sedih dan membantu untuk bangkit setiap merasa terpuruk. Kemudian terimakasih kepada:
2. Bapak Dr. KH. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku wakil Rektor I, Ibu Dr. Salma, M.HI selaku wakil Rektor II, dan Ibu Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku wakil Rektor III yang telah mengizinkan untuk menempuh studi di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

3. Ibu Dr. Radlyah H. Jan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado. Wakil Dekan I Bapak Dr. Ridwan Tabe, S.Pd, M.Si beserta Wakil Dekan II Ibu Dr. Dra. Nurlaila Harun, M.Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Chadijah Haris, M.M selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah sekaligus dosen Pembimbing II dalam Skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Pembimbing I dalam Skripsi penulis. Ibu Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A.,CA,CGRM selaku penguji I ujian Skripsi. dan Ibu Lilly Anggrayni, M.S.A selaku penguji II ujian Skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen IAIN Manado khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Terimakasih kepada Anisa Dwi Nuraini Kaida, Indrawati Pomanto, Nur Samsia Mangamba, Ikriah N.Didak, dan Lyan Karim yang telah menjadi teman sedari awal perkuliahan hingga sekarang dan memberikan dukungan dan bantuan hingga sampai pada tahap ini.
8. Terimakasih kepada Feyza Parindo, Alisyah Trie Asti Basala, Listiawati Makaluwas, Nur Ainun F. Noho, Sulisna Pulumuduyo yang sudah menjadi rekan selama diperantauan.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman seangkatan, terutama kepada teman-teman kelas Esb19 yang telah bersama sedari awal perkuliahan hingga sekarang yang masih tetap solid dalam kebersamaan.
10. Terimakasih kepada Nurmala Umar, Rohyayu Syaihul M, Osana Umasugi, Darmayanti Darjan Ode Bone, Surinda Ode Ruslan, Yarni Laujia, Ayu Darlita D.M Nur, Juniarti Modjoindo, Maslina La Indo yang telah menjadi teman tumbuh bersama.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini, sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadi referensi untuk menyusun lebih baik.

Manado, 27 Juli 2023

Eka Sari Nurcahyani
NIM. 1941050

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dianggap sebagai perubahan struktural dalam ekonomi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih mekanis dan maju untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lapangan kerja, pendapatan dan standar hidup penduduk. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan faktor sosial, politik dan kelembagaan untuk mendorong perubahan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur.¹

Istilah pembangunan ekonomi digunakan bergantian dengan istilah-istilah seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Namun, Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah membuat perbedaan yang lebih akrab antara istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti masalah di negara berkembang, dan pertumbuhan berarti masalah di negara maju. Menurut Schumpeter, perkembangan adalah perubahan spontan dan intermiten dalam keadaan stasioner yang terus-menerus mengubah dan menggantikan keadaan keseimbangan yang ada. Pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang yang lambat dan stabil yang terjadi melalui tabungan dan pertumbuhan penduduk.²

Pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Kaum Merkantilis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, tetapi mereka hanya tertarik pada masalah yang hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat. Kemudian pada tahun empat puluhan dan khususnya sesudah perang dunia II, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah terbelakang. Perhatian mereka di dalam ekonomi pembangunan lebih di dorong oleh gelombang kebangkitan politik yang melanda Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II. Aspirasi negara untuk

¹ A.O Myint, H., dan Krueger, 'Economic Development, Encyclopedia Britannica', in *Ekonomi Pembangunan*, 2016, p. Halaman 2.

² Schumpeter J.A, 'Perkembangan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi', in *Theory of Economic Development*, pp. 63–66.

pembangunan ekonomi yang cepat, dikombinasikan dengan kesadaran negara maju bahwa kemiskinan adalah risiko kemakmuran di mana-mana, telah memicu minat pada topik tersebut. Namun, kepentingan negara-negara maju dalam mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang tidak berakar dari rasa cinta terhadap kemanusiaan. Alasan utamanya adalah Perang Dingin antara Rusia dan Barat. Masing-masing dari mereka mencari dukungan dan kesetiaan negara-negara terbelakang dengan imbalan bantuan yang murah hati. Pengamatan Lyle W. Shannon: pada tahun-tahun mendatang pembangunan negara terbelakang akan menjadi ajang persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara terbelakang yang menyimpan kekayaan sumber alam akan dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan dunia; apalagi jika mereka memiliki lokasi strategis yang ditinjau dari sudut militer.³

Pada fase pre-industrial, ditemukan hubungan yang positif nonlinier antara ketimpangan indeks gini dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.⁴ Diawal pembangunan fluktuasi dan timpang telah terjadi penurunan memasuki masa post industrialisasi, yang kemudian setelah itu ketimpangan pembangunan kembali naik. Negara-negara sosialis, awalnya seperti Tiongkok dan Rusia, awalnya ketimpangan pembangunan memang rendah, namun kemudian Tiongkok mengalami sedikit kenaikan ketimpangan, sementara Rusia justru mengalami kenaikan yang sangat tajam.⁵

Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara:

1. Pembangunan ekonomi harus diukur dari segi pertumbuhan pendapatan nasional riil dalam jangka panjang. Namun, ini bukan definisi yang memuaskan.

³ Lyle W.Shannon, 'Underdeveloped Areas', in *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, 2016, p. Halaman 4.

⁴ Branko Milanovic, 'The Inequality Possibility Frontier Extensions and New Applications', in *Kajian Yang Komprehensif*, 2013, p. 6449.

⁵ Christoph Lakner and Branko Milanovic, 'Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to Great Recession', in *The World Bank Economic Review Advance Access*, 2015.

2. Dalam jangka panjang, ini terkait dengan peningkatan pendapatan riil per kapita. Para ekonom sependapat dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan riil atau output per kapita.
3. Ada tren lain yang mendefinisikan perspektif pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Misalnya, pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional per kapita riil meningkat seiring dengan menurunnya ketimpangan pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Ekonomi Islam mendefinisikan Sebuah sistem perilaku atau ekonomi yang mewakili aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Aturan Islam yang ada diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, ketika dilaksanakan, aturan-aturan tersebut dianggap pedoman, pedoman dan bersifat positif dan normatif. Namun demikian, karena paradigma Islam tetap harus menjadi acuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi syariah di Kota Ternate, kebijakan tersebut diwujudkan melalui dua sektor penting yaitu sektor keuangan dan sektor riil. Hal ini terlihat dari data berikut ini: *Pertama*, Kebijakan Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Syariah Maritim diprakarsai oleh organisasi Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Ternate. BPRS “Mesan Maritime” adalah Perda No. 27/2011 tentang Pendirian PT (Perda). Karena kinerja BPRS Bahari Berkesan yang baik, Pemerintah Kota Ternate harus menerbitkan peraturan baru yang memberikan keleluasaan bagi BPRS untuk melakukan inovasi pengembangan usaha dan mengkoordinasikan pengembangan keuangan dan perbankan. *Kedua*, Kebijakan pemungutan zakat bagi pejabat publik tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Dana yang terkumpul dalam dua tahun perda ini berjumlah 500.000.000 (lima ratus

⁶ O. Okun dan R.W. Richardson, ‘Studies in Economic Development’, in *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, 2016, p. halaman 230.

rupiah) yang digunakan pemerintah untuk membangun gedung yang lengkap bernama Duafa Center. Disebut gedung du'afa center karena dibiayai dari zakat pegawai negeri untuk tujuan dukungan sosial bagi du'afa. Bangunan tersebut kemudian disewakan (ijarah) oleh masyarakat umum untuk jam dan kegiatan tertentu dan dikelola sepanjang waktu. Dan hasil sewa gedung akan dikelola oleh Yayasan Du'afa Center, mendukung du'afa di Kota Ternate dalam bentuk bantuan produksi dan konsumsi. Dalam perkembangan selanjutnya, dana zakat pejabat di lingkungan pemerintah Kota Ternate dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurut data Baznas Kota Ternate, pada tahun 2018 penyaluran zakat PNS sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah). *Ketiga*, Kebijakan mewujudkan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate sebelah selatan, kota Ternate disebut dengan Prinsip Syariah atau Pasar Syariah.. *Keempat*, Kebijakan restrukturisasi BUMD dilakukan dengan menggabungkan beberapa BUMD (holding) dalam bentuk usaha Syariah. *Kelima*, mengembangkan potensi bisnis ekonomi syariah di Kota Ternate dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, bersama dengan perbankan Indonesia, perguruan tinggi dan lembaga khusus Islam, serta organisasi yang mempromosikan ekonomi Islam, seperti MES dan IAEI.

Kebijakan Kota Ternate di bidang pengembangan ekonomi syariah di atas dilatarbelakangi oleh beberapa pendekatan fundamental. *Pertama*, Pemerintah Kota Ternate berdasarkan kewenangan desentralisasi di bidang ekonomi Ternate. *Kedua*, mayoritas penduduk Ternate memeluk Islam (215.267 dari total 223.111 penduduk beragama Islam, menurut Sensus BPS Kota Ternate 2018). Jumlah penduduk muslim yang besar menghadirkan potensi pasar yang besar bagi perkembangan ekonomi umat Islam di kota Ternate. *Ketiga*, Kota Ternate yang dikenal sebagai Kesultanan dengan sistem pemerintahan Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk norma dan perilaku dalam kehidupan sosial masyarakat yang

beragam. *Keempat*, Kota Ternate berpotensi mengembangkan bisnis ekonomi syariah sebagai pintu gerbang dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Maluku Utara.⁷

Dikutip dari www.indotimur.com⁸ Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman Dalam sambutannya, ia mengatakan visi kemandiriannya merupakan cita-cita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Mempertimbangkan eksploitasi dan manajemen respons dan memperkuat kapasitas lokal untuk mendukung proses dan layanan pembangunan infrastruktur fisik dan digital Kota Ternate. Mengembangkan lembaga sosial dalam kerangka adat administrasi publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Visi keadilan berarti, di satu sisi, non-diskriminasi. Ini berarti bahwa orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan hukum, melindungi yang terpinggirkan dan mengembangkan budaya sosial. norma sosial. Ada banyak penggerak yang akan menjadi dasar pemulihan ekonomi dan pelantikan pemerintahan baru. Oleh karena itu, pentingnya konsep Pentahelix di kalangan pemerintah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya adalah untuk mendukung secara optimal program-program inklusif bagi penyandang disabilitas berupa pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu berpartisipasi penuh dalam ruang dan lingkungan sosial.

Dimensi ekonomi tanpa diskriminasi di Kota Ternate, "Penjelasan diatas, diketahui Kota Ternate memiliki beberapa macam desa, yaitu: *Pertama*, Kecamatan Pulau Ternate, *Kedua*, Kecamatan Ternate Selatan, *Ketiga*, Kecamatan Ternate Tengah, dan *Keempat*, Kecamatan Ternate Utara. Maka penulis mengkaji lebih jauh bagaimana jika menganalisis ketimpangan pada pembangunan ekonomi antar

⁷ Abd. Rauf Wajo, 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam Di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)', *Disertasi*, 2021.

⁸ Munawir. Suhardi, 'Wali Kota Ternate Paparkan Visi Misi Program Pemkot Ternate Periode Pertama', *Https://Indotimur.Com*, 2021.

Kelurahan di Kota Ternate. Beranjak dari masalah tersebut, penulis mengangkat judul: “Analisis Disparitas Perbandingan Pembangunan Ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate.”

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang telah diidentifikasi oleh penulis, yaitu:

1. Kebijakan dalam tantangan fiskal yang muncul dan dihadapi oleh pemerintah daerah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
2. Kebijakan perkembangan pembangunan ekonomi yang dipandang dalam proses yang dibarengi dengan pendapatan nasional nyata naik dengan dibarengi penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.
3. Kondisi adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional pada pembangunan ekonomi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan. Maka dalam batasan masalah penelitian ini telah membatasi masalah pada ketimpangan yang terjadi selama pembangunan ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate dengan menggunakan pandangan ekonomi Islam. Dalam hal ini, pengembangan ekonomi syariah kota Ternate dapat menjalankan kebijakan ekonomi pemerintah kota Ternate untuk pengembangan ekonomi antar Kelurahan dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2019-2022.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana ketimpangan perbandingan pada pembangunan ekonomi antar Kelurahan di tahun 2019-2022?

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui ketimpangan yang terjadi dan akan membandingkan pembangunan ekonomi antar tahun di Kota Ternate.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa meninjau ketimpangan dan membandingkan perkembangan ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate sejak tahun 2019-2022 serta meninjau pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan tinjauan perspektif ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam bidang Ilmu Ekonomi serta meningkatkan maupun memperdalam pengetahuan dan wawasan pada disparitas perbandingan pembangunan ekonomi yang ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi dan masukan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian lanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan acuan dalam membandingkan pembangunan ekonomi yang terjadi antar Desa di Kota Ternate sejak tahun 2019-2022 serta menjadikan acuan untuk pembangunan ekonomi kedepannya dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam.

G. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disparitas

Disparitas/Ketimpangan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan menjadi pendorong upaya peningkatan kesejahteraan warga agar daerah tertinggal tidak terlalu terasing dari tetangganya. Ketimpangan berdampak positif. Hal ini karena mendorong daerah tertinggal bersaing dengan daerah lain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kesenjangan yang semakin lebar antar daerah juga berdampak negatif. Dampak negatifnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang rendah, stabilitas sosial dan solidaritas yang terkunci, serta tingginya ketimpangan yang umumnya dianggap tidak adil.⁹ Disimpulkan disparitas/ketimpangan diartikan sebagai masalah perbedaan yang serius untuk dihadapi baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi terencana.

2. Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikasi perkembangan suatu wilayah dalam usahanya mencapai kemajuan serta tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Dalam konsepsi yang sederhana, ukuran dari tingkat kesejahteraan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi tersebut, merupakan perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk yang dimiliki atau disebut juga sebagai pendapatan perkapita. Bagaimana membuat suatu titik temu diantara upaya dalam meningkatkan pendapatan perkapita suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan disisi lain mengupayakan pemerataan pertumbuhan.¹⁰ Disimpulkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses perkembangan pendapatan yang lebih baik untuk suatu wilayah yang dikembangkan bersama dengan faktor sosial, politik ataupun kelembagaan untuk memfasilitasi usaha ekonomi yang di inginkan dari masyarakat pada daerah tersebut.

⁹ Chlarasinta Duri Kartika and others, 'Analisis Disparitas Pembangunan Di Indonesia 2010-2015', (*Studi Kasus 33 Provinsi*), 16.1994 (2015), 1-37 <[http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)>.

¹⁰ Siti Hodijah and Adi Bhakti, 'Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Investasi Di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014', 10.2 (2015), 302-11.

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif.¹¹ Disimpulkan penjelasan di atas, pembangunan ekonomi memaknai sumber daya manusia dan memiliki prinsip-prinsip dasar pada ekonomi. Hal ini, dapat dikatakan pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam mempunyai pegangan yang berbeda dengan pembangunan yang berlandaskan konvensional.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari persamaan ataupun perbedaan dalam penelitian sebelumnya agar bisa menjadi inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Maka telah dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu agar dapat dilihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini.

Pertama, Rizky Estu Handayani dan Wening Purbatin Palupi Soenjoto dengan judul “Perspektif dan Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional”. Hasil penelitian dari penelitian ini dapat dikatakan, suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila Produk Domestik Bruto (PDB) riil negara tersebut meningkat dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.¹² Persamaan ini mempunyai kesamaan dalam penelitiannya tentang pembangunan yang menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini karena dalam penelitian terdahulu mengkaji pembangunan ekonomi secara nasional sedangkan penulis meneliti tentang pembangunan ekonomi antarwilayah.

Kedua, Noviar dengan judul “Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020”. Hasil

¹¹ Djumadi, ‘Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam’, *Tahkim*, 12.1 (2016), 1–16 <<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/25>>.

¹² Rizky Estu Handayani and Wening Purbatin Palupi Soenjoto, ‘Perspektif dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional’, *Amal: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2.2 (2021), 58–73.

penelitian menunjukkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Banten periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten masih tinggi dan ada kecenderungan mengalami peningkatan.¹³ Persamaan; memiliki persamaan yang bisa dikatakan pada penelitiannya tentang ketimpangan pembangunan yang terjadi suatu wilayah dalam beberapa tahun. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tempat penelitiannya dan tahun yang akan diteliti.

Ketiga, Gracetyani Ovicha Naibaho, Juliana Ruth Mandei, dan Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara antar Kabupaten/Kota pada periode 2014-2018 mengalami peningkatan sebesar 0,49 dengan kriteria ketidakmerataan rendah.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini terdapat pada penelitiannya tentang menganalisis ketimpangan pembangunan pada suatu wilayah. Perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini pada wilayah dan tahun yang diteliti oleh penulis.

Keempat, Penelitian oleh Muhammad Ridho, dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi Di Pulau Sumatera”. Pada tahun 2021. Hasil Penelitian; Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 nilai ketimpangan pembangunan antar daerah di Sumatera setiap tahunnya semakin menurun dan tergolong ketimpangan rendah, sedangkan pembangunan antar daerah di Sumatera terbilang cukup merata dengan menggunakan rumus indeks Williamson. Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan

¹³ Noviar, ‘Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020’, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5.1 (2021), 24–33 <<https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>>.

¹⁴ Gracetyani Ovicha Naibaho, Juliana Ruth Mandei, and Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan, ‘Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara’, *Agri-Sosioekonomi*, 16.3 (2020), 369 <<https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093>>.

pendekatan Fixed Effect Model (FEM), variabel seperti pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif (-) terhadap won. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPW.¹⁵ Persamaan; keduanya sama-sama meneliti dengan fokus objek penelitian yaitu soal ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perbedaan; selain perbedaan daerah penelitian, juga metode yang digunakan adalah berbeda dimana penulis menggunakan metode Kualitatif sementara Muhammad Ridho menggunakan kuantitatif.

Kelima, Anggaharianto Ambar, Een N. Walewangko, dan Steeva Y.L Tumangkeng dengan judul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019”. Hasil pada penelitian terdahulu memiliki Kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah/kota di Maluku Utara periode 2015-2019 termasuk dalam kategori kesenjangan/ketimpangan rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa distribusi ekonomi antar wilayah/kota semakin merata. Meskipun indeks cenderung naik selama periode pengamatan, namun ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi relatif rendah dengan nilai rata-rata 0,277. Kesenjangan pembangunan ekonomi Maluku Utara antar wilayah/kota disebabkan oleh rendahnya mobilitas faktor produksi antar wilayah dan buruknya proses perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan aglutinasi sektor perdagangan hanya di kota Ternate.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada wilayah yang diteliti dan yang akan diteliti pada wilayah tersebut tentang ketimpangan apa yang telah terjadi selama pembangunan ekonomi berlangsung dari tahun ke tahun. Perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini yaitu lokasi peneliti terdahulu melingkup secara keseluruhan di Provinsi Maluku

¹⁵ Muhammad Ridho, Zulgani Zulgani, and Erni Achmad, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi Di Pulau Sumatera, E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 2022, xi <<https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005>>.

¹⁶ Steeva Y.L Tumangkeng³ Anggaharianto Ambar¹, Een N. Walewangko², ‘ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015-2019’, *Journal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21.01 (2021), 1–12.

Utara sedangkan penulis hanya ingin meneliti ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kota Ternate dan tahun yang diteliti pun berbeda.

Keenam, Yetty, Chairullah Amin, dan Zulkifli Waibor dengan judul “Peran Konektivitas dalam Pembangunan Ekonomi Kepulauan Provinsi Maluku Utara”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas secara positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara.¹⁷ Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini terdapat pada konsep judul yang dimiliki peneliti terdahulu dan penulis sama-sama tentang pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Perbedaan yang terdapat pada inti penelitian terdahulu menjelaskan tentang hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lain dan penulis meneliti tentang ketimpangan apa yang terjadi pada pembangunan ekonomi di suatu wilayah antar tahun.

I. Disparitas

Disparitas/ketimpangan antar-wilayah selain warisan historis, juga karena kebijakan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat serta belum signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antarwilayah. Menurut Myrdal dalam jurnal “Analisis Disparitas Pembangunan Indonesia” mengkritik keyakinan aliran Neo-Klasik yang menyakini ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil tersebut. Bagi Myrdal, pertumbuhan ekonomi adalah *spatial cumulative process* atau proses bertambahnya ruang yang memiliki karakteristik cenderung untuk senantiasa tetap. Pandangan Myrdal juga telah menjadi dasar dari tumbuhnya pemikiran baru tentang konvergensi pertumbuhan ekonomi antar-wilayah.¹⁸ Dapat disimpulkan

¹⁷ Yetty, Chairullah Amin, and Zulkifli Waibot, ‘Peran Konektivitas Dalam Pembangunan Ekonomi Kepulauan Provinsi Maluku Utara’, *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4.1 (2021), 50–60 <<https://doi.org/10.36883/jfres.v4i1.53>>.

¹⁸ Afif Zainuri and Abd Jamal, ‘Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2017), 1–10 <<http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/2442>>.

disparitas adalah suatu standar yang mengacu hidup yang relatif pada seluruh masyarakat.

Konsep disparitas mirip dengan konsep perbedaan. Satu orang memiliki kunci yang berbeda dari yang lain. Fakta menunjukkan bahwa ada perbedaan ketinggian. Memahami perbedaan tersebut relatif netral dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan moral. Berbeda halnya jika berbicara tentang perbedaan keyakinan kedua orang tersebut. Karena itu, mereka biasanya memiliki orientasi moral tertentu. Memahami perbedaan kekayaan memiliki implikasi moral dalam konteks hubungan sosial, misalnya siapa yang harus lebih toleran dan bagaimana kewajiban sosial dibebankan pada setiap orang tua. Memahami disparitas membutuhkan definisi. Pendefinisian kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah kelompok pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut kelompok-kelompok 10 persen populasi. Ini dimulai dengan 10% populasi berpenghasilan rendah. 10% berikutnya dari populasi dengan pendapatan tertinggi, dan seterusnya. Cara lain untuk mengkategorikan adalah berdasarkan tingkat pendapatan. 40% dari populasi memiliki pendapatan terendah. 40% berikutnya dari tingkat pendapatan rata-rata. dan 20% dari populasi berpenghasilan tinggi. Selain mengelompokkan orang berdasarkan tingkat pendapatan. Pengukuran paralaks juga menggunakan area sebagai kriteria pengelompokan. Pengelompokan berbasis wilayah ini berimplikasi pada pengamatan kesenjangan sosial antar wilayah. Berbagai metode pengelompokan lain yang umum digunakan adalah kelompok masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Di luar itu, minat untuk mengukur kesenjangan gender kini semakin berkembang.

Kondisi disparitas kesejahteraan biasanya dinyatakan dalam bentuk indikator disparitas. Berbagai penelitian umumnya menggunakan kurva distribusi Lorenz dan indeks keseragaman distribusi gini. Beberapa penelitian lain telah menggunakan indikator ketimpangan antardaerah yang pertama kali diperkenalkan oleh Williamson. Indeks Gini dihitung berdasarkan kurva distribusi Lorentz, sedangkan indeks

Williamson didasarkan pada varian distribusi statistik. Kesenjangan pembangunan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu faktor alam, kondisi sosial budaya dan keputusan kebijakan. Teori proses yang tidak proporsional biasanya menekankan peran satu atau lebih faktor ini. Faktor alam meliputi kondisi iklim pertanian, sumber daya alam, letak geografis, dan jarak antara pelabuhan dan pusat kegiatan ekonomi. Faktor sosial budaya meliputi nilai, tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi dan kewirausahaan. Akhirnya, pembuat kebijakan adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kesenjangan pembangunan.¹⁹

J. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan sosial yang melibatkan partisipasi luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk peningkatan keadilan, kebebasan dan kualitas lain yang dihargai di semua lapisan masyarakat) di semua lapisan masyarakat melalui kontrol khusus atas lingkungan.

Secara khusus, pembangunan yang mewujudkan hak asasi manusia berarti pembangunan yang memenuhi empat kebutuhan dasar kesejahteraan sosial, kebebasan, dan identitas, serta berupaya melepaskan diri dari empat belenggu kemiskinan, korupsi, penindasan, dan persekutuan.²⁰

Aspek Sosial dalam Pembangunan salah satunya mengenai kesejahteraan sosial dimana hal itu merupakan Ilmu terapan yang menyelidiki dan mengembangkan kerangka dan metodologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat, termasuk mengelola masalah sosial, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, dan memaksimalkan peluang pembangunan bagi anggota suatu komunitas.

¹⁹ Achmad. Rizal, 'Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya)', *Jurnal Akutika*, IV.2 (2020), 30.

²⁰ Soleha, 'Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa (Studi Desa Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) Skripsi', 2020.

Pembangunan sosial adalah suatu proses transformasi sosial yang dirancang dan dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dalam kaitannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dengan demikian, perkembangan sosial adalah perubahan manusia pada tingkat sosial. Dari perspektif pembangunan sosial, partisipasi masyarakat bukan sekedar alat atau metode, melainkan tujuan, harga diri dan kebebasan diwujudkan dan sekaligus ditingkatkan mutunya. Tiga Strategi besar juga di ungkapkan Midgley dalam Alfareshya Virsa sebuah konsep pembangunan pembangunan sosial dalam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu:

1. Pembangunan sosial melalui individu, dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
2. Pembangunan sosial melalui komunitas, dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Komunitas yang bisa menjadi contoh salah satu yang membantu pembangunan sosial adalah dompet dhuafa.
3. Pembangunan sosial melalui pemerintah dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah, pendekatan ini disebut juga pendekatan negara.²¹

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perkembangan dan kemajuan di bidang pembangunan guna peningkatan taraf kehidupan masyarakat khususnya pada sektor ekonomi, teori tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembangunan yang sebenarnya. Pada tahun 2000 perserikatan bangsa-bangsa (PBB) merumuskan delapan butir sasaran utama pembangunan yang dikemudian dikenal dengan *Millenium Development Goals*, antara lain:

²¹ Alfareshya Virsa, 'Dampak Proyek Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Landasan Pacu Runway 3) Terhadap Perkembangan Ekonomi Penduduk sekitar Bandara', *Pembangunan Ekonomi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, 2018).

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan secara eksterm
2. Memberikan Pendidikan dasar secara universal
3. Mendukung persamaan gender dan pemberdayaan Wanita
4. Meningkatkan tingkat moralitas anak
5. Meningkatkan Kesehatan ibu
6. Menjaga keseimbangan lingkungan
7. Mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Dampak negatif atau dampak positif yang terjadi terhadap lingkungan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha.

Adapun dampak pengembangan dalam aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar yaitu:

1. Terbukanya lapangan kerja baru
2. Berkurangnya tingkat pengangguran
3. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
4. Membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat.
5. Peningkatan pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik turun
6. Meningkatnya penggunaan teknologi
7. Berkurangnya rasa gotong-royong.

Proses pembangunan di berbagai daerah tentunya memberikan dampak, dan dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Sehingga masyarakat sekitar dapat mengimbangi dampak sosial tersebut.²² Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

²² Virsa. 'Dampak Proyek Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Landasan Pacu Runway 3) terhadap Perkembangan Ekonomi Penduduk sekitar Bandara'h. 19

saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, begitu juga sebaliknya. menjelaskan bahwa di dalam proses pembangunan, pembangunan social dan ekonomi membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial pada masyarakat secara menyeluruh. Jadi, dalam upaya untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu negara, dibutuhkan konsep dan strategi kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berjalan simultan dan berkelanjutan. Modal sosial menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial.²³

Jika kita menghubungkan dengan model pembangunan Islam. Dengan demikian, secara umum model pembangunan Islam saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan. Pendekatan ini didasarkan pada model pembangunan Ibnu Khaldun dan pencipta model pembangunan As-Syatibi. Kedua model ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dan yang pertama menekankan hubungan faktor pembangunan (ekonomi) untuk mencapai tujuan pembangunan. Model kedua menekankan model pembangunan sesuai dengan konfigurasi tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

1. Model Pembangunan Ibnu Khaldun

a. Model Pembangunan yang Dinamis dan Lintas Disiplin

Model yang dibangun oleh Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan, ekonomi dan peradaban dapat mengalami pasang surut, serta menjawab beberapa pertanyaan penting tentang fenomena yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial.

b. Determinan Pembangunan Berdasarkan Model Ibnu Khaldun

Detail tentang pengaruh faktor dan hubungannya dengan faktor lain mengikuti. Sebagai berikut:

1) Negara (*The State*)

²³ Syafar, M, 'Modal Sosial Komunitas dalam Pembangunan Sosial', 59 (2017), 1–22. h. 4

Dalam ajaran Islam, tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberikan kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik.

2) Institusi (*Institutions*)

Institusi atau Syariah, juga dikenal sebagai Syariah, membantu orang untuk menanamkan sifat-sifat baik seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kerendahan hati dan rasa kebersamaan yang dapat berkontribusi pada proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, perdamaian dan keharmonisan sosial. . dan kontrol. Tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Sumber Daya Manusia (Manusia).

Kemajuan dan kemunduran peradaban sangat ditentukan oleh kesejahteraan dan kemalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya, Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan pada peran manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dan ketidakbahagiaan suatu masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh variabel ekonomi, tetapi juga oleh banyak faktor lain yang mengalami proses sebab-akibat dalam jangka waktu yang lama.

3) Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan “Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.

4) Pembangunan (*Development*) dan Keadilan (*Justice*)

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif.²⁴

2. Model Pembangunan As-Syatibi

Model ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah model pembangunan As Syatibi. Pada dasarnya model pembangunan ini didasarkan pada konsep Makashid Syariah yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Model ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah model pembangunan As Syatibi. Pada dasarnya model pembangunan ini diterapkan berdasarkan konsep Makashid Syariah yang merupakan tujuan ekonomi Islam.

a. Agama

Agama atau kepercayaan melahirkan sistem nilai yang menopang kehidupan, yang pada gilirannya melahirkan tataran kebudayaan yang lebih tinggi. Misalnya, keyakinan akan adanya Tuhan sebagai penguasa alam semesta berimplikasi pada kehidupan dan akan mengarah pada nilai bahwa segala sesuatu yang ada di bumi yang dimiliki manusia sebenarnya adalah milik Tuhan.

b. Jiwa

Pembangunan harus mengutamakan ketersediaan kebutuhan hidup. Karena esensi Makashid Syariah adalah mengutamakan kualitas hidup manusia dan pembangunan fisik yang dihitung dari tingkat PDB dan angka pendapatan per kapita.

c. Akal

Manusia dianugerahi akal sebagai alat untuk mempertahankan diri. Inilah mengapa Syariah membutuhkan rasionalitas. Retensi dalam konteks ini berarti mengembangkan nalar, dan salah satu caranya adalah melalui pendidikan yang baik.

d. Keturunan

²⁴ A. Jajang W. Mahri, 'Ekonomi Pembangunan Islam', 2021. 123

Dalam konteks pembangunan, keturunan ini sangat memiliki peran vital terutama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.

e. Harta

Seperti yang disarankan oleh pendekatan tradisional, memastikan ketersediaan aset adalah salah satu persyaratan dasar dan karenanya menjadi tujuan utama pembangunan. Memperoleh kekayaan dari sudut pandang Islam tentu dianjurkan karena memiliki larangan dan aturan Syariah.²⁵

3. Konsep Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam M. Umer Chapra

Gagasan M. Umer Chapra tentang pembangunan ekonomi lahir sebagai tanggapan atas situasi ekonomi di negara-negara Muslim yang termasuk dalam kategori negara berkembang rata-rata, yang masih bergantung pada institusi dan dukungan dari Barat sekuler dan Amerika Serikat. . Karena itu, Chapra mengkritisi kelemahan ekonomi Barat, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan sistem ekonomi berbasis Islam, dan memberikan solusi bagi pembangunan ekonomi yang lebih baik di negara-negara Islam. Argumen dasar yang dibangun Chapra adalah bahwa dimensi "moral" dari pembangunan ekonomi yang dipraktikkan oleh kaum sekuler tidak dapat diremehkan. Muslim. Argumen dasar yang dibangun Chapra adalah bahwa dimensi "moral" dari pembangunan ekonomi yang dipraktikkan oleh kaum sekuler tidak dapat diremehkan.

Menurutnya, mereka menyatakan keinginan untuk menerapkan keadilan ekonomi dengan mengabaikan aspek moral. Sebaliknya, kemajuan material dan keadilan tidak dapat dicapai tanpa kemajuan moral. Dengan demikian, menurut Chpara, pemerataan pembangunan mensyaratkan efisiensi dan pemerataan penggunaan semua sumber

²⁵ Mahri "Ekonomi Pembangunan Islam", 126-127

daya, dan efisiensi serta keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan dimensi moral dalam pembangunan ekonomi.²⁶

Dalam hal ini, Umer Chapra menjelaskan tiga konsep dasar Islam yang melandasi pembangunan ekonomi: tauhid, khilafah, dan keadilan. Sebagai penjabaran dari tiga konsep dasar, Islam memiliki empat prinsip pembangunan ekonomi. *Pertama*, pembangunan ekonomi bersifat inklusif, kemudian mencakup komponen spiritual, moral, dan material yang berorientasi pada tujuan dan nilai global serta kebahagiaan (falah) yang terintegrasi. *Kedua*, pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia dan lingkungan budayanya. Ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan ekonomi modern yang cenderung memandang kemajuan manusia hanya dari segi materi. Paradigma ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif. Untuk pembangunan ekonomi, lebih penting memiliki sikap mental untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya daripada sekedar membangun ekonomi nasional. Islam memandang pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kedewasaan manusia, dan kemajuan material harus mendukung kedewasaan spiritual transendental. *Ketiga*, karena pembangunan ekonomi merupakan kegiatan multidimensi, diperlukan upaya penyeimbangan berbagai faktor untuk mencegah terjadinya ketimpangan. *Keempat*, pembangunan ekonomi Islam menekankan:

- a. Memaksimalkan sumber daya yang diberikan Tuhan kepada manusia dan lingkungan;
- b. Pemanfaatan sumber daya melalui pembagian yang adil berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.²⁷

Chapra kemudian menyusun kerangka konseptual pengembangan ekonomi Islam dalam upaya merealisasikan dan merealisasikan tujuan syariah (maqashid) untuk

²⁶ Abd Rauf. Wajo, 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021). 82.

²⁷ Wajo. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik) 85-86.

mewujudkan kesejahteraan manusia (falah) bagi seluruh umat manusia. Menurut Chapra, untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh kebijakan ekonomi diorientasikan pada lima tahapan sebagai kerangka acuan pengembangan ekonomi Islam:

Pertama, perkembangan faktor manusia. Ketika berbicara tentang faktor manusia, kita membutuhkan beberapa kebijakan:

- (1) Keseimbangan kepentingan pribadi dan sosial yang memadai dipastikan untuk penerapan nilai-nilai moral dan restrukturisasi sosial-ekonomi.
- (2) Pembangunan infrastruktur di pedesaan;
- (3) Keadilan sosial ekonomi;
- (4) Reformasi tenaga kerja;
- (5) Memberikan pengembalian yang lebih adil kepada pemegang obligasi dan pemegang minoritas;
- (6) eadilan bagi produsen, eksportir dan konsumen; Dan
- (7) Reformasi moral yang mengarah pada upaya pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan pertama sampai keempat bertujuan untuk mengurangi eksploitasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.

Kedua, mengurangi konsentrasi kekayaan. Mengenai kebijakan ini, manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga semua sumber daya alam harus digunakan dengan baik dan tidak dieksploitasi. Upaya ini sesuai dengan makna dan prinsip bahwa khalifah, atau pelindung, bertanggung jawab kepada para dewa. Komponen penting yang perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan adalah:

- (1) Reformasi tanah
- (2) Pengembangan usaha kecil dan menengah;
- (3) Pembatasan kepemilikan dan kontrol perusahaan diperlukan.
- (4) Optimalisasi fungsi zakat dan warisan.

Ketiga, melakukan restrukturisasi ekonomi. Beberapa kebijakan akan dilaksanakan dalam rangka rekonstruksi ekonomi.

(1) Melalui upaya mengubah preferensi konsumen melalui filter moral, reformasi fiskal, restrukturisasi lingkungan investasi, dan pendekatan baru terhadap masalah pengangguran.

(2) Menerapkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Membatasi Defisit.

Keempat, Restrukturisasi Treasury/Keuangan Dimulai. Untuk menata kembali keuangannya, masyarakat miskin bisa menjadi pengusaha karena bisa mendapatkan dana dari perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus berperan maksimal dan berkontribusi dalam penyelesaian ketimpangan melalui mediasi yang adil dan efisien.

Kelima, membuat rencana strategis. Sementara itu, renstra berfokus pada pengurangan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan secara dramatis mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan kekayaan. Negara Islam membutuhkan perencanaan karena dapat melakukan perhitungan realistis dengan semua sumber daya alam yang tersedia.²⁸

Dalam Pembangunan Ekonomi. Indikator Pembangunan Ekonomi Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa, indikator pembangunan ekonomi pada desa diantaranya;

1. Infrastruktur desa yang baik Indikator pertama dari perkembangan ekonomi suatu desa dapat dilihat dari infrastruktur desa itu sendiri, khususnya aksesibilitas jalan di sekitar desa. Beberapa kota memiliki jalan yang mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan, sementara yang lain memiliki akses jalan yang buruk sehingga menyulitkan kendaraan besar untuk melewatinya. Aksesibilitas jalan sangat penting dalam menentukan perkembangan suatu

²⁸ Wajo. 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate' (Perspektif Ekonomi Politik), 89-90.

kota. Di tempat-tempat dengan akses jalan yang mudah, logistik atau barang warga akan mudah terpenuhi. Di sisi lain, logistik akan sulit masuk ke kota karena aksesibilitas jalan.

2. Fasilitas Umum yang Tepat Guna mendukung pertumbuhan ekonomi desa, tentunya fasilitas desa yang ada harus didukung dengan baik. Sebuah fasilitas mendukung semua aspek kehidupan masyarakat di sebuah komunitas atau kota untuk membuatnya lebih baik. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolah, puskesmas, dan lainnya.
3. Akses informasi Salah satu pendukung pembangunan ekonomi desa adalah informasi. Akses informasi yang baik dapat mengembangkan ekonomi desa karena penduduk desa dapat belajar dari desa lain atau daerah perkotaan. Sehingga apa yang sudah berhasil tersebar di daerah lain bisa dicoba di kota itu. Indikator perkembangan ekonomi desa dapat diketahui dari berbagai informasi yang masuk ke desa. Memang, baik atau buruk, telah menjadi kota dengan akses informasi yang minim, tetapi hanya sedikit yang mampu berkembang pesat. Di sisi lain, kota-kota dengan akses informasi yang mudah akan berkembang pesat. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat di lihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.
4. Pendapatan Penduduk Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah Pendapatan Penduduk. Apakah penghasilan Anda cukup atau masih jauh di bawah rata-rata. Jika pendapatan penduduk di atas rata-rata maka desa

tersebut dikatakan desa maju, dan jika pendapatan penduduk masih kurang maka desa tersebut dikatakan desa tertinggal.²⁹

K. Pembangunan Daerah

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Daerah. Undang-undang Pusat dan Daerah No. 2004 tentang hal ini. 33 menandai perubahan dalam sistem pembangunan di mana kota diberikan lebih banyak kekuasaan untuk mengelola wilayah mereka. Menurut Sjafrizal, perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok. Pertama, memperluas kewenangan pengelolaan pembangunan pemerintah daerah (desentralisasi pembangunan). Kedua, pemerintah diberikan sumber daya fiskal baru dan kewenangan pengelolaan fiskal yang lebih besar (desentralisasi fiskal).

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pembangunan selaras dengan tantangan utama yang mereka hadapi. Masalah terbesar pembangunan daerah adalah penekanan kebijakan pembangunan (endogenous development) yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan material daerah. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong kegiatan ekonomi.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan memanfaatkan unsur-unsur

²⁹ Pustikom Universitas Hatta, '5 Indikator Pembangunan Ekonomi Desa yang Berhasil', <https://Ekonomi.Bunghatta.Ac.Id>, 2020.

perencanaan ruang yang dimiliki secara lokal dan keunggulan lokasi. Terjadi ketidakseimbangan kontribusi awal antar entitas ekonomi, sehingga pertumbuhan yang merata tidak tercapai dengan memanfaatkan keunggulan spasial dan lokasi masing-masing wilayah. Di sisi lain, kemampuan pembangunan suatu daerah memerlukan berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi.

Berikut adalah beberapa sumber penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi³⁰:

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanahnya, kondisi iklim dan cuacanya, jumlah dan jenis hasil hutan dan ikan yang dapat diperolehnya, serta jumlah dan jenis mineral yang dikandungnya. Sumber daya alam akan menjadi bahan bakar untuk membangun perekonomian nasional, terutama pada tahap awal proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan Mutu Dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah tinggi.

3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang modal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi global telah mencapai tingkat tinggi yang masih jauh lebih modern dari kemajuan yang dicapai oleh masyarakat terbelakang. Andai saja barang modal bertambah tanpa kemajuan teknologi, maka kemajuan yang

³⁰ Munefer Adin and others, 'Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Di Kota Ternate', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol XIII, No.2. Oktober 2022*, XIII.2 (2022), 1–23.

ingin dicapai akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dicapai saat ini. Tanpa kemajuan teknologi, produktivitas barang modal tidak akan berubah dan berada pada tingkat yang sangat rendah. Akibatnya, pendapatan per kapita nyaris tidak meningkat. Di banyak negara, perkembangan ekonomi yang meluas sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Menurut Wahyudi, ketimpangan kehidupan ekonomi terus tumbuh baik di dalam maupun antar negara. Seperti yang ditunjukkan oleh laporan UNDP tahun 1999, ketimpangan domestik telah meningkat di banyak negara, termasuk Cina, negara-negara Eropa Timur, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan negara-negara industri maju. Kesenjangan antara negara-negara seperti Swedia, Inggris, dan AS juga meningkat dari waktu ke waktu.

L. Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional yang dimana keadaan ekonominya bermula relatif selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) yang hingga sampai mencapai angka 5 atau 7 persen ataupun lebih dalam per tahun. Namun, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-1960 telah menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di Nota Selisih Barang (NSB). Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit.³¹

³¹ Lincoln Arsyad, 'Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi', *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05.01 (2015), 1-37.

Menurut Todaro, pembangunan ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang mengkaji perubahan multidimensi dalam struktur, sikap terhadap kehidupan, dan kelembagaan yang berkaitan dengan pembahasan kemiskinan. Di sisi lain, menurut Irawan dan Suparwoko, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, dan perkembangan pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi.

Menurut Djoohadikusumo, Pembangunan ekonomi terkait dengan peningkatan produksi, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan kelembagaan. Menurut Kuncoro, pembangunan ekonomi merupakan kombinasi dari berbagai paradigma untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensi yang mencakup baik pembangunan ekonomi maupun non ekonomi seperti perubahan struktur sosial, perilaku dan kelembagaan.³²

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kenaikan Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tanpa melihat apakah peningkatan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi di negara maju. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk melihat perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.³³

Dapat disimpulkan pembangunan ekonomi adalah multidimensi bagi kehidupan aspek masyarakat ataupun sebagai kegiatan yang dibentuk suatu negara dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan

³² Muhammad Hasan and others, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022. 30

³³ Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, 2022.

kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan *masalah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, *ijma*, *qiyas*, maupun *ijtihad* para ulama fakih.³⁴

Nilai ekonomi Islam dalam teori ekonomi tergolong baru. Dalam praktiknya, ajaran Islam memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi, namun secara struktural tetap harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Termasuk sektor ekonomi itu sendiri, yang muncul sebagai alternatif pengembangan selanjutnya dan menjadi bagian dari ekonomi Islam.

Kemunculan dan perkembangan ekonomi Islam juga memberikan alternatif bagi permasalahan lama yang bersumber dari kegagalan ideologi kapitalis. Di sisi lain, ajaran Syariat Islam justru menuntut pemeluknya untuk bersikap profesional, menunjukkan kerapian, kebenaran, keteraturan dalam berproses.³⁵

Oleh karena itu, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dasar ekonomi Islam, perlu ditelaah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan arah sistem ekonomi Islam saat ini. Hal ini akan menjadi dasar utama untuk menganalisis apakah pada prinsipnya ekonomi pembangunan Islam memang sangat berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan tradisional yang sedang berkembang saat ini.

Ekonomi pembangunan Islam harus memiliki prinsip dan dasar yang sama dengan ekonomi Islam pada umumnya. Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada paradigma yang mendasari kedua pendekatan ekonomi tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Prinsip ini juga sering disebut sebagai aksioma untuk membangun

³⁴ Purwana, 'Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam', 2013, hal 18.

³⁵ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 'Manajemen Syariah Dalam Praktek', *Gema Insani Press*, 2003, 1.

ekonomi Islam dari segi ilmu pengetahuan dan tuntunan kebijakan. Ekonomi Islam memiliki empat prinsip dasar, yaitu:

Pertama, Keesaan (Tauhid), kita tahu bahwa setiap muslim wajib mengimani Keesaan Allah SWT. Kewajiban untuk menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Mutlak dalam kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia atas harta adalah relatif atau hanya manusia yang diberi hak untuk mengelola harta tersebut dan menggunakan harta tersebut dengan cara Allah SWT. Seperti dalam beberapa surah di bawah ini:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ اِنَّ اِلٰهَنَاۗ اِلٰهًاۗ اَحَدًاۗ وَّعَدَ اللّٰهُ حَقًّاۗ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya: “Ketahuilah, sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S Yunus [10]:55).³⁶

Tafsiran: Sesungguhnya hanya Allah lah pemilik apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya ancaman Allah tentang hukuman bagi orang-orang kafir pasti akan terjadi, tidak ada keraguan sedikitpun tentang hal itu. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal itu, sehingga mereka merasa bimbang dan ragu.³⁷

فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُفْسِدُوْاۤ اِمۡرًاۙ سَدَدًاۙ وَّجٰهًاۙ وَّالۡاٰرۡضَۙ اَۡرۡضًاۙ وَّالۡاٰسۡمٰتَۙ اَسۡمٰتًاۙ وَّالۡاٰۤيٰتَۙ اٰۤيٰتًاۙ وَّالۡاٰۤمۡرَۙ اٰۤمۡرًاۙ وَّالۡاٰۤمۡرَۙ اٰۤمۡرًاۙ وَّالۡاٰۤمۡرَۙ اٰۤمۡرًاۙ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah [2]:195).³⁸

Tafsiran: Allah Ta’ala memerintahkan kepada mereka menginfakkan hartanya untuk jihad fi sabilillah, mempersiapkan dan memberikan fasilitas kepada rombongan

³⁶ Aplikasi Al-Qur’an, ‘(Q.S. Yunus[10]:55)’.

³⁷ Markaz Tafsir Riyadh, ‘Tafsir Al-Mukhtashar’, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram) <[³⁸ Aplikasi Al-Qur’an, ‘\(Q.S. Al-Baqarah\[2\]:195\)’.](https://tafsirweb.com/3329-surat-yunus-ayat-55.html#:~:text=□ Tafsir Ringkas Kementerian Agama,dia atur sesuai kehendak-Nya.>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

pasukan dan prajurit, dan Allah melarang mereka untuk pelit, tidak mau berinfaq di jalan Allah yang mana itu merupakan jihad.³⁹

Kedua, Keseimbangan (*Al-'Adl wa Al-Ihsan*), Ihsan di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab individu dan komunitas untuk merawat mereka yang memiliki akses terbatas terhadap manfaat. Kedua elemen ini diharapkan menjadi sasaran yang dapat mencapai rahmatan lil' alamin dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pemerataan sosial secara menyeluruh. Seperti dalam surah di bawah ini:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحَمَةً وَّذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ □

Terjemahnya: "Tidak cukupkah bagi mereka bahwa Kami menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam (*Al-Qur'an*) itu benar-benar terdapat rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." (*Q.S. Al-Ankabut [29]:51*)⁴⁰

Tafsiran: Allah mengingkari orang-orang kafir: "Apakah tidak cukup bagi orang-orang musyrik itu bahwa Kami telah menurunkan al-Qur'an kepadamu untuk dibaca, sehingga dapat mengetuk pendengaran mereka? Sungguh dalam al-Qur'an ini terdapat kenikmatan dan peringatan bagi orang-orang yang teguh dalam keimanan kepada Allah."⁴¹

Ketiga, Kehendak Bebas (Ikhtiar), manusia harus menggunakan kemampuan nalarnya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak yang ada dalam dirinya. Inilah yang memuliakan manusia di antara makhluk lain di muka bumi dan menjadikan mereka khalifah. Seperti dalam surah di bawah ini:

³⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 'Aisarut Tafasir', *Mudarris Tafsis Di Masjid Nabawi*.

⁴⁰ Qur-an Kemenag, 'Q.S Al-Ankabut [29]:51', *Kementerian Agama, Indonesia, 2019, 29* <<https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>>.

⁴¹ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, 'Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah', *Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah* <<https://tafsirweb.com/7277-surat-al-ankabut-ayat-51.html#:~:text=Artinya%3A> Dan apakah tidak cukup, bagi orang-orang yang beriman.>.

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَيْبُغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Terjemahnya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-An’am [6]:164-165)⁴²

Tafsiran: Dan tidak ada yang melakukan kesalahan kecuali mereka disalahkan atas dosa-dosa mereka. Dan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kemudian pada hari kiamat, ketika Anda kembali, tuhan Anda akan memberi tahu Anda apa yang Anda perdebatkan dalam masalah agama. Dan Allah lah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa dimuka bumi yang menggantikan umat manusia sebelum kalian, dengan ketaatan kepada Tuhanmu mereka membuat mereka mengikuti dan makmur, meninggikan sebagian dari Anda untuk bertahan hidup dan berkuasa di atas, dan kemudian menempatkan Anda dan mengambil tempat umat manusia. Allah lah yang menjadikannya penguasa negeri itu. Untuk menguji kamu atas karunia yang telah kamu terima, agar kamu dilihat oleh orang yang mengucap syukur dan yang tidak.⁴³

⁴² Qur-an Kemenag, ‘Q.S Al- An’am’ <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=1&to=165>>.

⁴³ ‘Tafsir Al-Muyassar’, Kementerian Agama Saudi Arabia <<https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html>>.

Keempat, Tanggung Jawab (*Fard*), pada prinsip hal ini menjelaskan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Karena Allah dapat meningkatkan derajat iman dan pada akhirnya mengarah pada satu tujuan. Itu adalah untuk membantu diri sendiri, orang lain dan masyarakat menuju satu tujuan. Ini tentang membantu sesama manusia. Seperti dalam surah di bawah ini:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۗ فَكَرَقَبَةَ ۗ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ

Terjemahnya: “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (Q.S. *al-Balad* [90]:12-16).⁴⁴

Tafsiran: Apakah kamu tahu jalan yang mendaki dan sukar itu. (yaitu) membebaskan budak. Atau memberi makan pada hari kelaparan. (Anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan) memiliki hubungan kekerabatan. (Atau orang miskin yang sangat membutuhkan) sangat membutuhkan, sehingga seakan-akan dia sudah dekat dengan tanah karena kefakirannya itu.⁴⁵

Penjelasan singkat tentang beberapa prinsip dasar etika ekonomi di atas yaitu; *Pertama*, mengatasi semangat pembangunan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kepentingan duniawi dan memenuhi kebutuhan sekuler mereka. Segala sesuatu dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, yang dicapai dengan perkembangan Islam tidak hanya fisik/materi tetapi juga spiritual. *Kedua*, kita akan memimpin pembangunan ekonomi Islam tidak hanya untuk pembangunan individu, tetapi juga untuk pembangunan kolektif, pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan dan melindungi keadilan. Aksioma ini juga berarti bahwa ekonomi pembangunan Islam mengutamakan pembangunan yang mendesak, yaitu kelompok

⁴⁴ Aplikasi Al-Qur'an, '(Q.S. Al-Balad[90]:12-16)'.

⁴⁵ Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, 'Tafsir Ash-Shaghir', *Dimuraja'ah Oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-'Awaji, Professor Tafsir Univ Islam Madinah* <<https://tafsirweb.com/12708-surat-al-balad-ayat-12.html>>.

yang lemah dan terpinggirkan. *Ketiga*, hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan pasti ada proses kontrol yang dilakukan oleh manusia baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Kelangkaan bukanlah masalah utama prinsip ekonomi Islam, tetapi merupakan masalah yang menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua kategori: kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Kelangkaan relatif ini pada dasarnya percaya bahwa ada cukup banyak yang tercipta di dunia ini, tetapi yang membuatnya langka adalah keserakahan manusia. Selain keserakahan, kelangkaan juga muncul karena keterbatasan manusia dalam menggali sumber daya dan mendistribusikannya secara adil kepada manusia lain dalam jangka waktu tertentu. *Keempat*, menyiratkan bahwa pembangunan dalam Islam merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab manusia selaku subjek dan objek dari pembangunan. Dimana tanggung jawab ini bukan hanya sebatas untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan wujud penghambaan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi. Aksioma ini mendorong agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat individualis dan memperhatikan kepentingan bersama dan mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Beberapa prinsip-prinsip di atas sangat jelas menunjukkan perbedaan dengan ekonomi pembangunan yang konvensional. Keempat aksioma ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari hasil diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁶

Kegiatan pembangunan ekonomi Islam sebagai madzab ekonomi tersendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan madzab ekonomi yang sebelumnya.⁴⁷ Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian pembangunan ekonomi Islam:

⁴⁶ A. Jajang W. Mahri, Cupian, and other, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021.

⁴⁷ Doddy Rudianto, 'Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis Di Indonesia', *Golden Terayon*, 1985, 15.

- a. Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia.
- b. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as Sunnah dan merupakan bangunan dari perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.
- c. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.

Pengertian di atas memberikan perbedaan yang besar dengan madzab ekonomi sebelumnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai dasarnya adalah:

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.
- b. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur

keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Dengan kata lain maksud ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁸ Berikut beberapa rancangan penelitian:

M. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan pada Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan waktu penelitian yang akan berlangsung selama April-Mei 2023.

N. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila terjadi dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung *memberikan* data kepada pengumpulan data. Dapat disimpulkan data primer adalah data yang didapatkan langsung dari pegawai/karyawan pada sebuah perusahaan. Misalnya data dari penelitian ini akan diambil langsung dari hasil yang diberikan dari pegawai Kantor

⁴⁸ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2021, p. 9.

Badan Pusat Statistik (BPS) Ternate untuk mengetahui ketimpangan yang telah terjadi di antar Desa di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang *tidak langsung* memberikan data kepada pengumpulan data.⁴⁹ Misalnya lewat dokumen, jurnal, maupun artikel yang telah kita peroleh dari pencarian yang kita dapatkan melalui website.

O. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan (triangulasi).

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Nasution dalam buku ‘Metode Penelitian Kualitatif, Sugiyono’ menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵⁰ Disimpulkan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini seperti yang telah kita lihat secara nyata dan kemudian kita amati untuk bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

2. *Interview* (wawancara)

Menurut Esterberg dalam buku ‘Metode Penelitian Kualitatif, Sugiyono’ mendefinisikan *interview* sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Disimpulkan wawancara

⁴⁹ Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 104.

⁵⁰ Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 106.

⁵¹ Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 114.

merupakan salah satu komunikasi antara dua orang untuk informasi yang dicari dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁵² Disimpulkan dokumentasi adalah bentuk bukti yang disimpan pada sebuah file yang berbentuk gambar hidup ataupun sketsa yang menjelaskan kejadian pada penelitian yang akan dilakukan.

4. Gabungan (Triangulasi)

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵³ Hal ini, didefinisikan campuran dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi untuk disimpulkan menjadi bahan pengumpulan data dalam penelitian ini.

P. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

⁵² Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2021, p. 124.

⁵³ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2021, p. 125.

Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Beberapa langkah analisis ditunjukkan, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan).⁵⁴ Peneliti memilih teknik ini dikarenakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat sistematis dan akurat ataupun tepat.

K. Profil Kota Ternate

Kota Ternate adalah sebuah kota yang terletak di bawah kaki gunung api Gamalama di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara provinsi Maluku Utara secara *de facto* dari tahun 1999 hingga 2010. Pada tanggal 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan menjadi ibu kota Maluku Utara pengganti Ternate, sebuah kelurahan di Kota Tidore Kepulauan yang berada di pulau Halmahera. Luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 km² dan luas daratan 250,85 km². Kota Ternate memiliki 7 kecamatan dan 77 kelurahan.⁵⁵ Berikut tabel penjelasan masing-masing kelurahan yang ada di kecamatan Kota Ternate, yaitu:

Tabel 4.1

Jumlah Kelurahan Kota Ternate

Kecamatan	Jumlah Kelurahan
-----------	------------------

⁵⁴ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2021, pp. 132–141.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 'Profil Kota Ternate', <ternatekota.bps.go.id>.

Pulau Ternate	13
Moti	6
Pulau Batang Dua	6
Pulau Hiri	6
Ternate Selatan	17
Ternate Tengah	15
Ternate Utara	14
Jumlah	77

Sumber tabel. Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2015

Kota Ternate merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 29 Desember 1250 (Peraturan Kode Daerah 02 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Ternate). Perayaan penyelamatan Ternate pada tanggal 29 Desember 1250 merupakan hasil seminar sejarah yang diadakan oleh pemerintah kota Ternate, dengan asumsi bahwa tanggal 29 Desember adalah hari kemenangan Sultan Babullah atas Portugis. . Dari sinilah peristiwa itu menyulut patriotisme dan “identitas diri” masyarakat Ternate. Hal ini dikarenakan tahun 1250 merupakan tahun lahirnya kota Ternate dan awal proses berdirinya "Kota Sampalo" sebagai ibu kota pertama "Ternate". Dengan demikian, per Desember 2019 Kota Ternate telah berusia 769 tahun. Sebagai kota bersejarah, Ternate telah mengalami tiga perubahan nomenklatur yang berbeda. Menata wilayah utara sebagai daerah (UU No. 11 Tahun 1999). Sedangkan di Kota Praja pasarnya antara lain M.A.M Soleman, Do Usman Syaifuddin, Hin Diao dan J.A. Wesplat.

Dari kota administratif hingga kotamadya, Ternate secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dan 58 desa. Selama pengembangan, itu dipecah menjadi 4 kecamatan pada tahun 2001 dan 7 kecamatan dimekarkan pada tahun 2009. Berdasarkan Perda Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016, Kota Ternate merupakan

kabupaten baru di Wilayah Kepulauan Ternate yang berkembang menjadi 8 kecamatan.⁵⁶

L. Hasil Penelitian

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate:

a. Infrastruktur

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Panjang jalan di Kota Ternate pada tahun 2018 sepanjang 388,08 km, bertambah 2,85% dari tahun sebelumnya. 44,13 km nya merupakan jalan milik negara, 25,11 km jalan milik provinsi dan 329,89 km nya merupakan jalan yang dikelola oleh pemerintah kota Ternate. Dilihat dari jenis permukaannya, 196, 19 km atau 54, 79% jalan di kota ternate merupakan jalan hotmix dan selebihnya merupakan jalan kerikil, tanah, paving, maupun beton. Dari segi kondisi, sebanyak 69,01% merupakan jalan berkondisi baik, sisanya berkondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Kota Ternate merupakan kota yang padat kendaraan. Jumlah kendaraan di kota ternate meningkat 6,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data UPTD Samsat kota ternate, 40.532 kendaraan pribadi dan 1.182 kendaraan dinas milik pemerintah yang terdaftar. Kendaraan baru pada tahun 2019 sebanyak 7.530 kendaraan. Sebanyak 450 mobil, bus, 202 truk, dan 6.982 motor yang terdaftar pada UPTD Samsat kota ternate. Tuntutan mobilitas tinggi membuat masyarakat ternate cenderung untuk memiliki kendaraan pribadi untuk beraktivitas di kota ternate.⁵⁷

⁵⁶ Abd Rauf. Wajo, 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam Di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021). 118-119.

⁵⁷ Badan Pusat Kota ternate Statistik, *Kota Ternate Dalam Angka 2019* (Ternate: BPS Kota Ternate, 2016), vi.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kelurahan *relative* bervariasi, hal ini sangat berkaitan dengan fokus pembangunan oleh pemerintah daerah sendiri. Hal yang paling menonjol menyol perbedaan pembangunan tentu saja soal infrastruktur yang sangat jauh berbeda di kota ternate sendiri, hal ini tidak terlepas dari adanya fokus pembangunan oleh pemerintah kota, secara umum jalanan sebagai penghubung utama transportasi, dari segi kualitas tentu saja di rasakan oleh mereka yang tinggal di pusat perkotaan, sementara daerah pinggiran seperti kecamatan batang dua, infrastruktur jalan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar yang tidak sepadat seperti kecamatan lainnya seperti pada kecamatan ternate selatan, utara, dan tengah. Meskipun demikian, masih banyak juga di dapati keadaan jalanan yang rusak parah di daerah kecamatan dengan padat penduduk.

b. Fasilitas Umum

1) Sekolah

Diantara fasilitas umum yang harus ada ditengah masyarakat adalah ketersediaannya sarana Pendidikan formal, Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain anggaran pendidikan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana, kualitas kurikulum hingga pemerataan Pendidikan. Dalam peningkatan kualitas Pendidikan, Jumlah guru dan ketersediaan prasarana memiliki pengaruh penting sebagai dasar untuk pemerataan pendidikan. Pada tahun 2019, Kota Ternate memiliki 109 sekolah dasar, 29 sekolah menengah pertama, 20 sekolah menengah atas, dan 9 sekolah menengah kejuruan yang tersebar di Kota Ternate. Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) di Kota Ternate mencapai 18.163 orang, dengan jumlah guru sebanyak 1.259 orang. Rasio murid guru pada Sekolah Dasar yaitu rata-rata seorang guru mengajar 14 orang murid.

Berikut tabel rasio murid dan guru pada sekolah menurut kecamatan di Kota Ternate, yakni:

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Pulau Ternate	2	6	8
Moti	3	1	4
P. Batang Dua	-	4	4
P. Hiri	1	1	2
Ternate Barat	1	3	4
Ternate Selatan	-	28	28
Ternate Tengah	-	30	30
Ternate Utara	4	17	21

Sumber: BPS, Jumlah Sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan

Jika dilihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sekolah swasta sangat mendominasi dibandingkan dengan sekolah negeri. Sementara rata-rata sekolah swasta sendiri selain milik perorangan atau Yayasan, juga sangat erat dengan biaya yang relative lebih mahal, hal ini tentu dapat memunculkan ketimpangan di masyarakat yang kurang mampu, alhasil kebanyakan akan putus sekolah.

2) Kesehatan

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Rumah sakit	Rumah Bersalin	Poliklinik
Pulau Ternate	-	-	-

Moti	-	-	-
P. Batang Dua	-	-	-
P. Hiri	-	-	-
Ternate Barat	-	-	-
Ternate Selatan	1	-	1
Ternate Tengah	3	-	2
Ternate Utara	1	-	2

Sumber: BPS. Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan.

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Pulau Ternate	1	2	-
Moti	1	2	-
P. Batang Dua	1	3	-
P. Hiri	1	2	-
Ternate Barat	1	-	-
Ternate Selatan	2	2	9
Ternate Tengah	2	2	9
Ternate Utara	2	2	4

Sumber: BPS. Jumlah Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan menurut kecamatan,

Jika melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sarana Kesehatan masyarakat yang lengkap adalah di kecamatan Ternate Selatan, Tengah dan Utara, perlu penulis garis bawahi bahwa ketiga daerah tersebut secara tata letak adalah berdekatan dan berada ditengah pusat kota ternate, maka sudah bisa di pastikan bahwa pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa daerah kecamatan lain, meskipun sarana Kesehatan masyarakat (Puskesmas) juga ada di kecamatan yang lain.

Sementara itu, meskipun pusat Kesehatan kota ternate terfokus pada 3 wilayah kecamatan yaitu kecamatan ternate selatan, tengah dan utara, namun justru paling dominan dengan angka gizi buruk pada bayi lahir, hal tersebut juga di alami oleh wilayah kecamatan yang lain. Seperti pada tabel dilembaran berikut ini:

Tabel 4.5

Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Buruk menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR	Gizi Buruk
Pulau Ternate	124	-	2
Moti	80	-	6
P. Batang Dua	33	-	13
P. Hiri	43	-	1
Ternate Barat	166	-	-
Ternate Selatan	1734	-	14
Ternate Tengah	1274	-	27

Ternate Utara	1105	-	11
---------------	------	---	----

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate

Sejak 2014, kota ternate sangat gencar menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan balita serta ibu hamil hingga menyusui, hal ini terlihat pada Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2014 pasal 4, 5, 11.

Pasal 4:⁵⁸ Setiap ibu berhak:

1. Mendapatkan pelayanan Kesehatan selama kehamilan, nifas dan menyusui.
2. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga Kesehatan yang terlatih dan kompeten.
3. Penanganan kesulitan persalinan yang adekuat sesuai dengan standar pelayanan.
4. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Ibu.
5. Menolak pelayanan Kesehatan yang diberikan kepadanya dan bayinya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi.
6. Memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya termasuk Tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan

Pasal 5:

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

1. Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya.
2. Pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir.
3. Air susu kolostrum.
4. Air susu ibu eksklusif.
5. Imuniasasi dasar.
6. Memperoleh vitamin K.

⁵⁸ Pemerintah Kota Ternate, 'Peraturan Daerah Kota Ternate Profinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2014' (Ternate: Pemerintah Kota Ternate, 2014), 10–27

Pasal 11:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

c. Akses Informasi

Tidak mengherankan jika banyak orang berkunjung di kota ternate akan mendapati bahwa susah dalam mendapatkan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa lawatan para pengunjung yang mengabadikan perjalanan mereka di media sosial juga merasakan hal yang sama, selain akses listrik di beberapa kelurahan yang terbatas, juga jaringan telekomunikasi yang terputus dan tidak stabil. Di kutip dari PT. Telkom Indonesia Cabang Kota Ternate, bahwa dari 8 kecamatan yang ada di kota ternate baik jumlah pelanggan telepon dan internet sama sekali tidak ada. Berikut akses listrik dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Akses Informasi

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Telepon	Jumlah Pelanggan Internet
Pulau Ternate	-	-
Moti	-	-
Pulau Batang Dua	-	-
Pulau Hiri	-	-
Ternate Barat	-	-
Ternate Selatan	-	-
Ternate Tengah	-	-
Ternate Utara	-	-

Sumber: PT. Telkom Indonesia Cabang Kota Ternate

Dikutip dari <https://ambon.antaranews.com>, Upaya mewujudkan kebutuhan infrastruktur jaringan bagi masyarakat di kecamatan terkebelakang seperti Kecamatan Pulau Batang Dua, pemerintah menargetkan pada 2023 warga pulau Batang Dua terutama Kelurahan Tifure, Pantai Sagu, Mayau, Bido, Perum Bersatu, dan Kelurahan Lelewi sudah bisa mengakses jaringan internet secara gratis, namun hingga saat ini belum Nampak kebenaran berita tersebut.

d. Pendapatan Penduduk

Sebagian besar penduduk kota ternate bekerja pada lapangan usaha jasa, perdagangan, dan pertanian, kecamatan ternate tengah merupakan wilayah penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate. Kontribusi kecamatan ternate tengah mencapai Rp. 2044205.482, sedangkan kontribusi PDRB kecamatan lain di kota ternate terbilang rendah. Yang di pengaruhi jumlah penduduk setiap kecamatan. Nilai PDRB yang bear tidak selalu mencerminkan bahwa kemakmuran penduduknya selalu lebih baik dari wilayah lainnya. Tingkat kemakmuran umumnya diukur dengan pendapatan perkapita yang menunjukkan ratio antara PDRB dengan jumlah penduduk.

Berikut bentuk tabel sarana perekonomian menurut Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah, yakni:

Tabel 4.7

Jumlah Sarana Perekonomian menurut Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah

Kelurahan	Pasar Umum	Toko	Kios/Warung	Waru Nasi	Rumah Makan	KUD/Non KUD
Maliaro	-	4	164	34	-	-
Kampung Pisang	-	3	34	19	2	-
Takoma	-	3	35	23	2	-
Kota Baru	1	4	53	43	1	-

Muhajirin	-	56	29	12	5	-
Tanah Raja	-	31	24	7	4	-
Stadion	-	18	23	15	2	-
Marikurubu	-	-	43	11	-	1
Moya	-	-	46	2	2	-
Salahuddin	-	4	162	5	-	-
Santiong	-	7	36	21	4	-
Kalumpang	-	3	49	18	2	-
Gamalama	7	417	382	62	12	-
Makassar Timur	1	23	52	14	-	-
Makassar Barat	-	4	43	32	-	-
Tongole	-	-	37	3	1	-

Sumber: BPS. Jumlah Sarana Perekonomian Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah.

Sumber pendapatan terbesar penduduk kelurahan Ternate Tengah berasal dari sektor perdagangan dan salah satu kelurahan yaitu kelurahan Gamalama berasal dari sektor jasa kota Ternate. Sebagai pusat perdagangan kota Ternate, kecamatan Ternate pusat memiliki fasilitas perekonomian yang relatif baik. Dari seluruh pasar di Kota Ternate, Kabupaten Ternate Tengah memiliki delapan pasar.

Begitu pun dengan sarana perekonomian lainnya seperti Toko sebanyak 577 toko, kios/warung sebanyak 1.212 dan warung nasi sebanyak 321. Sementara itu, di wilayah lain yang baru dimekarkan, akses sarana perekonomian sangat berbanding terbalik dengan kondisi wilayah yang sudah lebih berkembang, kelurahan di kecamatan Pulau Batang Dua, terdiri dari 6 kelurahan, dari data yang ada, kios atau

warung makan lah yang mendominasi di tiap kelurahan yang ada. Berikut tabel sarana perekonomian menurut Kelurahan di Kecamatan Pulau Batang Dua.

Tabel 4.8

Jumlah Sarana Perekonomian menurut Kelurahan di Kecamatan Pulau Batang Dua

Kelurahan	Pasar Umum	Toko	Kios/Warung	Waru Nasi	Rumah Makan	KUD/Non KUD
Pante Sugu	-	-	6	-	-	-
Tifure	-	-	10	-	-	-
Lelewi	-	-	7	-	-	-
Mayau	-	2	7	3	-	-
Bido	-	-	8	-	-	-
Perum Bersatu	-	-	3	-	-	-

Sumber: Kantor Camat Pulau Batang Dua

Sebagai Kecamatan yang baru dimekarkan, sarana perekonomian di wilayah ini masih relative sedikit tercatat hanya aada 2 toko, 41 warung/kios, sedangkan pasar belum ada di seluruh kelurahan wilayahnya.

e. Ketimpangan lainnya

Data diatas adalah gambaran kondisi Kota Ternate, namun ternyata hal tersebut belum selesai. Kota Ternate secara umum masih dilingkupi berbagai maslaah pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan. Misalnya masalah dalam infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan lingkungan hidup.

Berbagai aksi protes dari warga teerhadap pemerintah terus bergulir baik dari masyarakat umum hingga elemen pemuda dan mahasiswa. Hal yang paling di soroti

adalah ketimpangan pembangunan di kecamatan Pulau Batang Dua, selain itu masalah yang dihadapi Kota Ternate sebagai kota pulau bahwa Ternate tak hanya pulau Ternate tetapi wilayahnya tersebar dari ternate hingga perbatasan Halmahera Selatan dan Sulawesi Utara. Terdapat 3 wilayah kecamatan di Kota Ternate yang tidak mendapatkan perhatian serius, yakni Kecamatan Moti, Batang Dua dan Hiri. Padahal ketiga wilayah tersebut juga bagian integral dari wilayah administrasi Kota Ternate.

Kecamatan Batang Dua misalnya dengan dua pulau yakni Tifure dan Mayau memiliki permasalahan keterpinggiran yang luar biasa. Sama halnya dengan Kecamatan Moti dan Hiri. Banyak masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang menyuarakan bahwa ketiga wilayah kecamatan tersebut sering diabaikan dan luput dari kebijakan pembangunan. Apalagi jika menyoroti kondisi Kecamatan Batang Dua yang sangat jauh dari ibu kota Ternate, dimana kondisinya sangat terpinggir dan terisolir. Dari keterbatasan infrastruktur dasar saja sangat terbatas. Kemiskinan dan pengangguran juga sangat tinggi, hal ini masih luput dari fokus pemerintah Kota Ternate.

Padahal dua pulau di Kecamatan Batang Dua tersebut memiliki Potensi yang sangat luar biasa dari sektor perkebunan, perikanan dan peternakan. Jumlah penduduk serta potensi yang dimiliki membutuhkan pemerataan pembangunan terutama pelabuhan dan jembatan, hal tersebut tentu saja sebagai sarana melancarkan arus produksi barang dan manusia. Sama halnya dengan pembangunan sarana telekomunikasi, di kecamatan Batang Dua masih sangat terbatas, hal ini tentu saja menyulitkan warga masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar apalagi dalam hal bisnis penjualan hasil alam. Belum lagi menyoal jalan keliling pulau yang sampai saat ini masih sangat memprihatinkan.

Kesungguhan masyarakat di tiga kecamatan tersebut diatas sebenarnya sangat tinggi untuk dapat maju dari sektor pendapatan, namun masih terkendala dengan

infrastruktur, meskipun sebenarnya ada transportasi Tol Laut Ternate-Batang Dua-Bitung, namun oleh masyarakat menuturkan bahwa adanya tarif yang terkadang tidak menentu serta terlalu mahal dalam hal transportasi barang produksi warga masyarakat. tarif tersebut biasanya dihitung Rp. 110.000 per karung, namun ada masyarakat yang menemukan angka yang berbeda dilapangan yakni Rp. 350.000.

Aksi protes masyarakat hingga saat ini masih terus disuarakan., aliansi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa cipayung juga tidak henti-hentinya menyuarakan ketimpangan tersebut yang di alami oleh tiga Kecamatan., diantara tuntutananya yaitu desakan kepada pemerintah Kota Ternate untuk Menuntaskan berbagai masalah dan ketimpangan yang ada, terutama persoalan pembangunan infrastruktur, jalan dan pelabuhan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan pelayanan listrik. Selain itu juga agar pemerintah kota Ternate menyediakan sarana transportasi laut untuk menunjang pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Batang Dua, di bidang Pendidikan juga pemerintah diharapkan dapat menyediakan tenaga guru terutama di Kecamatan Batang Dua.

Aksi-aksi protes dari warga masyarakat yang terisolir terus disuarakan, warga masyarakat di tiga kecamatan paling terisolir hanya bisa mengharapakan suara mereka bisa di dengar oleh pemerintah Kota Ternate melalui suara-suara kelompok atau aliansi yang bisa menyuarakan secara langsung, aliansi masyarakat Pulau Hiri misanya pernah melakukan aksi dan menyatakan sikap ingin memastikan gambaran pembangunan dermaga di APBD-P 2020, MENDESAK PEMERINTAH Kota Ternate membangun dermaga di Pantai Hao Madaha sebelum proses pemilihan Walikota pada 2020 lalu. Dalam aksinya mereka mengeluhkan soal pemerataan air bersih di pulau Hiri. Pembangunan tower jaringan internet di kelurahan Faudu Pulau Hiri, percepatan fasilitas Kesehatan, ketersediaan pelayanan KUA dan pengaktifasian pasar di Hiri.

Di kutip dari www.kabarpulau.co.id bahwa persoalan Kota Ternate sebenarnya bukan hanya soal elemnter semisal pelayanan dan infrastruktur pelayanan masyarakat. Namun perihal pembangunan dibidang lingkungan hidup yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana pernah dibicarakan dalam *Focus Diskusi Group* (FGD) pada beberapa waktu lalu dengan tema “Perencanaan Pembangunan Kota Pulau Ternate. Ada tiga persoalan mendasar yang dikemukakan dalam FGD tersebut yaitu; persoalan urban, keterbatasan lahan sampah dan air bersih.

Kota Ternate menghadapi ketersediaan air bersih yang cukup pelik, kasus tercemarnya sumber air Ake Gaale Kota Ternate hingga kini belum tuntas. Pendistribusian air bersih untuk warga kota masih terus dikeluhkan apalagi warga yang berada di daerah ketinggian masih menghadapi masalah serius menyangkut pelayanan air bersih.

Belum lagi soal sampah yang dihasilkan oleh warga kota Ternate sudah mencapai 80 ton per harinya dimana 20 ton tidak terangkut dan mencemari pantai dan laut. Produksi sampah terus meningkat karena penduduk Kota Ternate yang terus bertambah. Tercatat volume sampah 2017-2019 mencapai 60-65 ton setiap harinya dan pada 2020 meningkat 80 ton perhatinya.⁵⁹ Belum lagi jika ditambah dengan pertambangan yang Sebagian besar hingga kini tidak ada izin. Dimana galian-galian pertambangan ini menjadi ancaman serius karena dampaknya sangat serius.

Menyoroti aktivitas di Kecamatan Ternate selatan, tengah dan utara juga tak kalah pelik adalah soal tingginya angka pertumbuhan kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak seimbang dengan ruas jalan yang dimiliki kota Ternate, Kota Ternate sendiri adalah Kota dengan Kendaraan Roda Dua terdapat di Indonesia. dimana tidak bisa dibayangkan bagaimana padatnya aktivitas di jalan yang tidak diimbangi dengan perbaikan ruas jalan.

⁵⁹ Mahmud. Ichi, ‘Problem Pembangunan Kota Ternate’, <https://Kabarpulau.Co.Id>, 2020.

2. Tinjauan Ekonomi Islam pembangunan ekonomi antar Kelurahan di Kota Ternate

Dalam bahasan tinjauan ekonomi Islam terhadap Pembangunan antar Kelurahan di Kota Ternate, penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kerangka ide untuk melihat proses pembangunan di Kota Ternate Khususnya pada wilayah kecamatan hingga Kelurahan. Dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah bukan hanya soal kemampuan akan tetapi kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan, kebersamaan dengan masyarakat adalah kunci pembangunan, baik sarana, infrastuktur, ekonomi (pendapatan), akses, serta sumber daya manusianya. Kunci dari hal tersebut adalah pemerintah. Jika melihat konsep pembangunan ekonomi oleh Ibnu Khaldun, maka akan di dapati beberapa indikator yang mesti dikuatkan, diantaranya:

a. Negara (*The State*)

Dalam ajaran Islam, tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberikan kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik.

Sosok pemimpin sangat ditekankan oleh Ibnu Khaldun dalam pembangunan ekonomi dan menjadi indikator utama dalam pembangunan ekonomi, tentu sosok pemimpin dalam hal ini harus memahami lebih mendalam potensi wilayah pembangunannya. Kemakmuran di wilayah kota ternate setelah diuraikan diatas diketahui bahwa terjadi disparitas pembangunan, meskipun kota ternate adalah wilayah kepulauan, namun akses antar pulau terbilang mudah dan bisa di akses oleh semua warga ternate. Namun dalam hal ini terjadi ketidak sesuaian antara visi misi pemerintah kota dengan kondisi wilayah, dimana pemerintah kota memfokuskan pada peningkatan UMKM, sementara kondisi masyarakat kota ternate di beberapa

kecamatan kelurahan sangat bervariasi dan tidak semua berfokus pada usaha berdagang ataupun mempunyai usaha, masih banyak warga masyarakat yang menjadi nelayan dan petani, hal ini menurut hemat penulis tidak dimaksimalkan, selain itu pemerintah memfokuskan pada sektor investasi untuk menunjang pembangunan, hal ini justru akan menjadikan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam seperti Bertani dan nelayan menjadi masyarakat industry yang di atur dan dikuasai oleh investor.

b. Institusi (*Institutions*)

Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Sumber daya insani (*Human Beings*)

Maju dan mundurnya suatu peradaban sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan pada peran manusia. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses sebab akibat dalam waktu yang panjang. Berikut salah satu tabel pengaruh kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat, yakni:

Tabel 4.9

Pengaruh Kesejahteraan dan Kesengsaraan Masyarakat

Jenis Kejahatan	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Pidana	135	161	206

Penyelesaian Tindak Pidana	91	161	206
Presentase Penyelesaian Perkara	67%	64%	66%
Selang Waktu	5.19.48	-	4.25.24
Resiko Terkena Tindak Pidana	63	-	90

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Masyarakat kota ternate sebagai masyarakat beradat tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dalam artian bahwa masyarakat kota ternate di wilayah-wilayah kecamatan hingga ke tingkat kelurahan mempunyai semangat dan kesadaran akan hidup bermasyarakat sehingga kebersamaan ini adalah modal yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bisa menjadi kekuatan membangun kota ternate, dan tidak lebih memilih konsep investasi asing untuk membangun kota ternate.

Namun jika merujuk pada table di atas maka ada peningkatan resiko terkena tindak pidana dari tahun ke tahun, serta peningkatan jumlah tindak pidana, hal ini oleh penulis melihat bahwa kondisi ekonomi yang tidak merata serta pembangunan yang tidak merata menjadi faktor meningkatnya jumlah kejahatan.

c. Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan “Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat

Pemerintah Kota Ternate melalui visi misi yaitu “menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional”, namun hingga saat ini kesenjangan masih dirasakan oleh masyarakat khususnya mereka daerah kepulauan, masyarakat kepulauan berfokus pada dua aspek yaitu nelayan dan Bertani, perbedaan pendapatan pajak yang dihasilkan oleh wilayah kecamatan membuat pembangunan selalu tidak merata, wilayah kecamatan ternate selatan, tengah, utara, menjadi prioritas pembangunan dikarenakan sektor usaha yang berkembang pesat, hal ini dikarenakan wilayah tersebut juga sebagai pusat pemerintahan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup potensial di wilayah Kota Ternate. Tanaman perkebunan banyak diusahakan di Kota Ternate karena sejak zaman colonial dulu kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Kota Ternate tidak memiliki Kawasan lahan sawah. Beras diimpor dari Pulau Halmahera ataupun dari wilayah lain. Pada tahun 2020, luas panen cabai sekitar 66 Ha dengan hasil produksi panen nya sebanyak 303 kwintal. Luas panen tomat sekitar 46 Ha dengan hasil produksi sebanyak 743 kwintal.

Selain itu pemerintah pertambangan tumbuh pesat di kota ternate, hal ini dianggap sebagai batu loncatan perekonomian daerah, namun hingga saat ini hasil tersebut belum bisa dirasakan oleh warga masyarakat, berbagai persoalan terjadi seputar pertambangan di Maluku Utara, dari bagi hasil tak adil, kemiskinan sampai persoalan lingkungan hidup.

Demikian antara lain yang terungkap dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu di Ternate, Maluku Utara. Hasil eksploitasi tambang, masih menjadi persoalan antara lain hak bagi hasil mineral tambang buat daerah. KH Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara menyuarkan ketidakadilan pembagian hasil tambang antara pusat dan daerah. Hasil tambang masuk ke pusat dan daerah tak kebagian.

Dalam logika perkotaan, tentu pajak menjadi salah satu landasan perekonomian, perkotaan melalui pemerintahnya yang dibatasi oleh masa jabatan selalu menggunakan cara-cara instan untuk bisa mendongkrak pendapatan daerah, maksudnya adalah meskipun misi yang di usung adalah kemandirian ekonomi regional dalam hal ini masyarakat, namun kenyataannya investasi masih menjadi pilihan strategis untuk mendapatkan hasil pajak yang besar, maka tidak heran perbedaan pembangunan sangat terasa di daerah perkotaan khususnya daerah kota ternate, sektor tambang dan usaha perkotaan lainnya seperti pertokoan, pariwisata menjadi dominan.

d. Pembangunan (*Development*) dan Keadilan (*Justice*)

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Seperti yang di uraikan di atas bahwa terdapat perbedaan pembangunan serta fokus pembangunan oleh pemerintah kota ternate, hal ini dikarenakan fokus pendapatan daerah yang lebih memilih cara instan yaitu lewat investasi, apalagi investasi tersebut tidak menguntungkan atau tidak dirasakan oleh masyarakat.

Jika melihat pada jumlah populasi masyarakat kota ternate per kecamatan maka kita dapat melihat bahwa populasi masyarakat di setiap kecamatan sebenarnya adalah kekuatan pembangunan itu sendiri, dimana setiap kecamatan di isi oleh mereka yang fokus dengan produktivitas ekonomi masing-masing. Berikut tabel populasi masyarakat Kota Ternate yaitu:

Tabel 4.10

Jumlah Populasi Masyarakat Kota Ternate

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pulau Ternate	4.440	4.295	8.735
Moti	2.397	2.414	4.811

Pulau Batang Dua	1.434	1.357	2.791
Pulau Hiri	1.481	1.441	2.922
Ternate Barat	4.420	4.368	8.788
Ternate Selatan	37.309	37.020	74.329
Ternate Tengah	26.993	26.650	53.643
Ternate Utara	24.645	24.337	48.982

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilain sisi, jumlah populasi tiap kecamatan di kota ternate masih berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang melandah masyarakatnya di tiap kelurahan. Hal ini sebagaimana dalam uraian table dibawah ini mengenai Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan Tahun, 2020. Berikut tabel populasi yang melandah kemiskinan masyarakat di tiap kelurahan, yakni:

Tabel 4.11

Jumlah Populasi menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan
Pulau Ternate	3.253	650. 600. 000
Moti	5.063	973. 500. 000
Pulau Batang Dua	5.210	1. 001. 900. 000
Pulau Hiri	4.214	809. 600. 000
Ternate Barat	4.605	845. 100. 000

Ternate Selatan	7.433	1. 431. 650. 000
Ternate Tengah	8.269	1. 592. 800 000
Ternate Utara	6.769	1. 301. 900. 000

Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat penerima bantuan per kepala keluarga di kota ternate masih sangat tinggi, beberapa kecamatan sangat berbanding lurus dengan angka populasi penduduk, artinya dengan angka penerima bantuan sosial per kepala keluarga tersebut dibandingkan dengan angka populasi jiwa pada kecamatan maka jumlahnya sangat banyak yang masih di bawah garis kemiskinan dan memerlukan bantuan.

Diantara deretan kecamatan yang masih tinggi angka penerima bantuan sosial adalah kecamatan ternate, Moti, Pulau Batang Dua, Pulau Hiri, dan Kecamatan Ternate Barat. Sementara 3 Kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Ternate Selatan, Tengah dan Utara masih dibawah rata-rata dari jumlah keseluruhan populasi penduduk. Untuk lebih merinci garis kemiskinan dan penduduk miskin di kota ternate, maka penulis menguraikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 4.12

Jumlah Garis Kemiskinan di Kota Ternate

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2015	459 551	6370	2,99
2016	489 810	5740	2,67
2017	514 396	6041	2,73

2018	537 524	6760	3,00
2019	578 185	7250	3,14
2020	595 553	8180	3,46

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka tersebut diatas oleh penulis menganggap masih sangat tinggi, meskipun demikian namun dalam indeks pembangunan manusia di kota ternate terhitung tinggi yakni berada pada kisaran 75 hingga 80 persen:

Tabel 4.13

Jumlah Garis Kemiskinan menurut Indeks Pembangunan Manusia di Kota Ternate

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan (Rp000)	Indeks Pembangunan Manusia
2016	70,17	15,06	11, 13	12 643	77,80
2017	70,27	15,30	11,25	12 989	78,48

2018	70,50	15,72	11,26	13 166	79,13
2019	70,85	15, 73	11,58	13 632	80,03
2020	70, 97	15, 74	11,71	13 091	79,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ternate

Seperti yang dikatakan Bapak Sahril selaku kepala Lurah pada kelurahan Tanah Tinggi di Kota Ternate menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan taraf hidup masyarakat yang seperti sektor pembangunan sekolah atau pembangunan UMKM karena dari tahun ke tahun Kota Ternate memiliki peluang pendapatan semakin tinggi.

M. Pembahasan

Dari berbagai jenis literasi yang penulis temukan menyangkut pembangunan di kota ternate, rata-rata menunjukkan hasil penelitian yang sama yaitu adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah baik kecamatan hingga kelurahan yang penulis teliti, pun demikian yang penulis lihat dan merupakan hasil observasi sejak awal yaitu adanya perbedaan kualitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah baik kecamatan hingga kelurahan di kota ternate, baik segi infrastruktur jalanan, air bersih, pelabuhan, akses Pendidikan Kesehatan pendapatan. Perbedaan pulau seakan menjadi pembatas nyata soal kehidupan warga masyarakat kota ternate, dimana dari data yang penulis uraikan di atas dapat diketahui bahwa antara kelurahan yang berada di kecamatan ternate selatan, utara, barat adalah kecamatan dengan kualitas hidup lebih baik dari segi pendapatan, akses Pendidikan, Kesehatan, infrastruktru, dan lainnya meskipun juga memiliki catatan tersendiri. Namun di daerah kecamatan yang lain, kelurahan-kelurahan masih merasakan ketimpangan yang sangat jauh berbeda dari sebuah kota.

Penulis melihat hal tersebut bahwa adanya sebuah konsep dasar yang keliru dalam pembangunan ekonomi kota ternate, dan kota umumnya di Indonesia. yaitu

perihal pola pembangunan kota dengan konsep ekonomi yang instan, kota pada umumnya sering dipandang dengan dua arah yaitu mereka yang tinggal diluar kota bahwa kota adalah tempat yang identik gedung-gedung tinggi, mewah, ekonomi yang baik, keindahan dan kemajuan, namun bagi masyarakat kota yang tinggal di dalam ruang lingkup perkotaan menganggap bahwa kota adalah tempat padat, tingkat kemiskinan tinggi, kompetisi, kriminalitas, yang kaya dan miskin serta yang kuat dan lemah. Sementara pemerintah dalam hal ini memandang kota sebagai wujud peradaban maju dan terkemuka disbanding yang lain, konsep ekonomi yang sering digunakan adalah ekonomi instan, maksudnya adalah pendapatan daerah menjadi prioritas dalam hal ini, maka siapa yang dapat memberikan pendapatan daerah yang besar dan cepat maka akan mendapatkan tempat di kota. Maka tidak heran jika investor sering melirik dan mendekat di perkotaan untuk mengembangkan bisnisnya karena selain mendapatkan akses, juga menjadi ladang yang subur untuk pertumbuhan bisnis, dari pemerintah kehadiran investor adalah cara cepat untuk mengembangkan kota, maka masyarakat biasa yang berprofesi sebagai pekerja dengan penyumbang pajak rendah akan kalah dengan sendirinya dengan kepentingan para investor. Di kota Ternate pada pusat keramaian kota Ternate seperti kecamatan Ternate Selatan, Utara, Barat akan sangat mudah menemukan gambaran perkotaan sebagaimana pada umumnya yaitu pertokoan, tempat-tempat perbelanjaan, pariwisata dan lainnya. Dimana itu semua adalah kepunyaan para pebisnis yang sudah berkorporat satu sama lain, sementara di sudut-sudut perkotaan tinggal mereka yang terpinggirkan dengan pendapatan yang rendah. Di pulau lain di kota ternate tidak terjamah karna pusat ekonomi masih terfokus pada daerah padat penduduk, selain itu silih bergantinya pemerintah (walikota) tidak mampu mengembangkan daerah kecamatan di luar pulau Halmahera.

Padahal tanpa investor dalam membangun kota sangat dimungkinkan hanya mengandalkan ekonomi rakyat, di kota ternate dengan sumber daya alam yang sangat

luar biasa serta semangat para masyarakatnya adalah nilai tambah untuk bisa mengembangkan kota ternate dari segi kesejahteraan para masyarakatnya. Yang dibutuhkan adalah akses dan kemudahan masyarakatnya, sebut saja akses pengolahan, penjualan, air bersih, pelabuhan, yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjual hasil sumber daya alam baik pertanian maupun peternakan.

N. Kesimpulan

Ketimpangan yang berlangsung pada pembangunan ekonomi antar kelurahan di kota Ternate di ketahui berbagai permasalahan yang dihadapi atau di alami oleh warga masyarakat khususnya di Tiga wilayah Kecamatan/Kelurahan yaitu Kecamatan Batang Dua, Moti, dan Hiri. Diantaranya soal ketersediaan air bersih, akses jalan (infrastuktur) yang tidak memadai, akses Kesehatan yang tidak lengkap, serta akses Pendidikan yang memerlukan perhatian, dan pelayanan public. Dalam hal ekonomi, masyarakat terkendala dengan akses arus penjualan hasil produksi, dimana tidak adanya akses yang mudah untuk masyarakat menjual hasil perkebunan, peternakan maupun hasil laut. Di wilayah lain seperti Kecamatan/Kelurahan Ternate Selatan, Tengah, dan Utara sebagai pusat Kota Ternate di ketahui permasalahan utama yaitu akses infrastruktur jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada, selain itu peningkatan produksi sampah yang meningkat kebanyakan dihasilkan di wilayah ini dan belum teratasi.

O. Saran

Masih banyak hal yang bisa dijadikan bahan penelitian berkaitan dengan pembangunan ekonomi, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya ini. Oleh karena itu saran, masukan sangat diperlukan untuk perbaikan karya ini. Dalam hal ini telah menjadi perhatian pemerintah Kota Ternate dalam melakukan kestabilan pembangunan untuk mencegah hambatan pada pembangunan Kota Ternate yang hanya berfokus pada pusat yang padat penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin, Munefer, Daud Hasim, Lulusan Fakultas, Ekonomi Dan, and Bisnis Universitas, ‘Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Di Kota Ternate’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol XIII, No.2. Oktober 2022*, XIII.2 (2022), 1–23
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, ‘Aisarut Tafasir’, *Mudarris Tafsir Di Masjid Nabawi*
- Al-Qur’an, Aplikasi, ‘(Q.S. Al-Balad[90]:12-16)’
- , ‘(Q.S. Al-Baqarah[2]:195)’
- , ‘(Q.S. Yunus[10]:55)’
- Anggaharianto Ambar¹, Een N. Walewangko², Steeva Y.L Tumangkeng³, ‘ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015-2019’, *Journal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21.01 (2021), 1–12
- Arsyad, Lincolin, ‘Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi’, *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05.01 (2015), 1–37
- As-Sariih, Fayiz bin Sayyaf, ‘Tafsir Ash-Shaghir’, *Dimuraja’ah Oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-‘Awaji, Professor Tafsir Univ Islam Madinah* <<https://tafsirweb.com/12708-surat-al-balad-ayat-12.html>>
- Djumadi, ‘Konsep Pembangunan Ekonomi Persektif Islam’, *Tahkim*, 12.1 (2016), 1–16 <<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/25>>
- Duri Kartika, Chlarasinta, kementrian kesehatan RI, Program Studi, Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, and others, ‘Analisis Disparitas Pembangunan Di Indonesia 2010-2015’, (*Studi Kasus 33 Provinsi*), 16.1994 (2015), 1–37 <[http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)>
- Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, 2022
- Hafidz, Markaz Ta’dzhim al-Qur’an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad

- Zuhair, 'Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah', *Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah* <[https://tafsirweb.com/7277-surat-al-ankabut-ayat-51.html#:~:text=Artinya%3A Dan apakah tidak cukup, bagi orang-orang yang beriman.](https://tafsirweb.com/7277-surat-al-ankabut-ayat-51.html#:~:text=Artinya%3A%20Dan%20apakah%20tidak%20cukup%20bagi%20orang-orang%20yang%20beriman.)>
- Handayani, Rizky Estu, and Wening Purbatin Palupi Soenjoto, 'Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional', *Amal: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2.2 (2021), 58–73
- Hasan, Muhammad, Hartoto, Abdelina, Muhammad Haris Riyaldi, Aswanto, Taufik Akbar, and others, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022
- Hatta, Pustikom Universitas, '5 Indikator Pembangunan Ekonomi Desa Yang Berhasil', <https://ekonomi.bunghatta.ac.id>, 2020
- Hodijah, Siti, and Adi Bhakti, 'Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Investasi Di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014', 10.2 (2015), 302–11
- Ichi, Mahmud., 'Problem Pembangunan Kota Ternate', <https://kabarpulau.co.id>, 2020
- J.A, Schumpeter, 'Perkembangan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi', in *Theory of Economic Development*, pp. 63–66
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, and others, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021
- Milanovic, Branko, 'The Inequality Possibility Frontier Extensions and New Applications', in *Kajian Yang Komprehensif*, 2013, p. 6449
- Milanovic, Christoph Lakner and Branko, 'Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to Great Recession', in *The World Bank Economic Review Advance Access*, 2015
- Myint, H., dan Krueger, A.O, 'Economic Development, Encyclopedia Britannica', in

Ekonomi Pembangunan, 2016, p. Halaman 2

Naibaho, Gracetyani Ovicha, Juliana Ruth Mandei, and Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan, 'Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara', *Agri-Sosioekonomi*, 16.3 (2020), 369
<<https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093>>

Noviar, 'Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020', *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5.1 (2021), 24–33
<<https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>>

O. Okun dan R.W. Richardson, 'Studies in Economic Development', in *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, 2016, p. halaman 230

Pemerintah Kota Ternate, 'Peraturan Daerah Kota Ternate Profinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2014' (Ternate: Pemerintah Kota Ternate, 2018), 10–27

Purwana, Agung Eko, 'Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Justicia Islamica*, 10.1 (2013) <<https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>>

Qur-an Kemenag, 'Q.S Al- An'am' <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=1&to=165>>

———, 'Q.S Al-Ankabut [29]:51', *Kementerian Agama, Indonesia*, 2019, 29
<<https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>>

Ridho, Muhammad, Zulgani Zulgani, and Erni Achmad, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*, *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 2022, XI
<<https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005>>

Riyadh, Markaz Tafsir, 'Tafsir Al-Mukhtashar', *Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram)*
<<https://tafsirweb.com/3329-surat-yunus-ayat-55.html#:~:text=□ Tafsir Ringkas>>

- Kementrian Agama,dia atur sesuai kehendak-Nya.>
- Rizal, Achmad., ‘Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya)’, *Jurnal Akuatika*, IV.2 (2020), 115–30
- Rudianto, Doddy, ‘Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis Di Indonesia’, *Golden Terayon*, 1985, 15
- Sahril, Bapak, ‘Kepala Lurah’
- Soleha, ‘DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA (Studi Desa Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) SKRIPSI’, 2020
- Statistik, Badan Pusat Kota ternate, *Kota Ternate Dalam Angka 2019* (Ternate: BPS Kota Ternate, 2016), VI
- Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 9
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 104
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 106
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 114
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 124
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, p. 125
- , ‘Metode Penelitian Kualitatif’, 2021, pp. 132–41
- Suhardi, Munawir., ‘Wali Kota Ternate Paparkan Visi Misi Program Pemkot Ternate Periode Pertama’, *Https://Indotimur.Com*, 2021
- Syafar, Muhammad, ‘Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- ‘Tafsir Al-Muyassar’, *Kementerian Agama Saudi Arabia*
<<https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html>>
- Tanjung, Didin Hafidudin dan Hendri, ‘Manajemen Syariah Dalam Praktek’, *Gema Insani Press*, 2003, 1

- Ternate, Badan Pusat Statistik Kota, 'Profil Kota Ternate' <ternatekota.bps.go.id>
- Virsa, Alfareshya, 'Dampak Proyek Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Landasan Pacu Runway 3) Terhadap Perkembangan Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara', *Pembangunan Ekonomi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, 2018)
- W.Shannon, Lyle, 'Underdeveloped Areas', in *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, 2016, p. Halaman 4
- Wajo, Abd. Rauf, 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam Di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)', *Disertasi*, 2021
- Yetty, Chairullah Amin, and Zulkifli Waibot, 'Peran Konektivitas Dalam Pembangunan Ekonomi Kepulauan Provinsi Maluku Utara', *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4.1 (2021), 50–60 <<https://doi.org/10.36883/jfres.v4i1.53>>
- Zainuri, Afif, and Abd Jamal, 'Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2017), 1–10 <<http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/2442>>

